

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017

Beserta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6 - 71

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Eka Cahyana
Alamat Kantor : Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan – 20241
Alamat domisili, sesuai KTP : Jl. Cipeucang II No. 3 RT 004 / RW 012, Kelurahan Koja,
Kecamatan Koja – Jakarta Utara
Nomor telepon : 061 – 6610220
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Farid Luthfi
Alamat Kantor : Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan – 20241
Alamat domisili, sesuai KTP : Pesanggrahan Permai IV/D – 12
RT 005 / RW 007, Kelurahan Petungkang Selatan,
Kecamatan Pesanggrahan – Jakarta Selatan
Nomor telepon : 061 – 6610220
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 12 Februari 2018

DIREKTUR KEUANGAN

DIREKTUR UTAMA

FARID LUTHFI

BAMBANG EKA CAHYANA



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Ref.: R-091/Pelindo1-adf/SHT01/II/2018

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT PELABUHAN INDONESIA I (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PELABUHAN INDONESIA I (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan Audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

HEAD OFFICE :

The Royal Palace
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A - C 29
Jakarta Selatan 12810 - Indonesia
T : 62 21 831 3861 (hunting)
F : 62 21 831 3871
E-mail : central.mail@kanaka.co.id
Website : www.kanaka.co.id
Firm License : 588/KM.1/2008.2 September 2008

BRANCH OFFICE :

Jl. Mesjid / Taman Kyoto Blok B/Heian No. 23
Medan 20122
T : 62 61 8225 186
F : 62 61 8225 186
Email : ade.fatma@kanaka.co.id
Website : www.kanaka.co.id
Branch Licence : 106/KM.1/24 Februari 2016

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PELABUHAN INDONESIA I (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian PT PELABUHAN INDONESIA I (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 3 Februari 2017.



Suhartono, MPA, Ak., CA, CPA
NRAP.0206

12 Februari 2018

Ref.: R-091/Pelindo1-adf/SHT01/II/2018

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2e, 2f, 4, 40a	1.872.411.160.625	2.200.769.796.594
Piutang usaha - bersih	2e, 2g, 5, 40b		
Pihak berelasi		40.217.792.573	17.491.412.257
Pihak ketiga		160.361.067.822	107.830.180.316
Persediaan	2i, 2p, 6	23.716.976.975	20.116.083.124
Pajak dibayar dimuka	2t, 22a	142.729.554	
Uang muka	7	13.533.211.925	10.493.294.616
Biaya dibayar di muka	2j, 8	1.749.455.476	4.145.276.461
Aset keuangan lancar lainnya	2e, 2g, 9	97.416.051.632	120.497.145.657
JUMLAH ASET LANCAR		<u>2.209.548.446.582</u>	<u>2.481.343.189.025</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi entitas asosiasi	2k, 10	52.504.512.535	44.426.032.784
Investasi entitas ventura bersama	2l, 11	1.163.988.198.834	900.759.210.428
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.821.381.672 pada tahun 2017 dan Rp4.639.632.667 pada tahun 2016	2m, 2p, 12	189.858.355.697	8.849.841.133
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.602.168.291.223 pada tahun 2017 dan Rp1.394.213.292.567 pada tahun 2016	2n, 2p, 13	4.637.926.530.908	3.750.634.523.627
Aset tidak berwujud	2o, 14	202.775.204.132	80.451.824.082
Aset pajak tangguhan	2t, 22d	3.018.574.652	
Aset tidak lancar lainnya	15	31.759.306.268	33.180.513.302
Aset keuangan tidak lancar lainnya	16	15.764.186.140	1.706.175.878
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		<u>6.297.594.869.166</u>	<u>4.820.008.121.234</u>
TOTAL ASET		<u>8.507.143.315.748</u>	<u>7.301.351.310.259</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2e, 17, 40c		
Pihak berelasi		631.556.095.033	461.175.324.008
Pihak ketiga		800.916.485.096	614.159.982.774
Biaya yang masih harus dibayar	2e, 18	166.380.229.903	209.002.860.663
Utang pajak	2t, 22b	48.077.542.635	35.955.877.699
Utang bank jangka pendek	2e, 23a	10.571.780.774	-
Bagian lancar liabilitas jangka panjang	2e, 23b	52.883.016.545	47.000.000.000
Bagian lancar pendapatan diterima dimuka	19	110.876.536.593	66.791.714.857
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	20	1.782.961.739	-
Liabilitas jangka pendek lainnya	21	93.105.289	77.501.000.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		1.823.137.753.607	1.511.586.760.001
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang bank	2e, 23c	327.000.000.000	52.883.016.545
Utang obligasi	2e, 24	996.601.217.455	995.770.735.699
Liabilitas imbalan kerja	2v, 25	194.888.043.417	153.649.951.025
Liabilitas pajak tangguhan	2t, 22d	51.567.795.902	49.321.401.959
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	26	209.724.744.084	236.963.533.712
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		1.779.781.800.858	1.488.588.638.940
JUMLAH LIABILITAS		3.602.919.554.465	3.000.175.398.941
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal	27		
Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar - 1.800.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1.700.000 saham pada 2017 dan 2016		1.700.000.000.000	1.700.000.000.000
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS)	2z, 28	525.884.662.252	538.812.899.239
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya		1.915.728.560.174	1.402.206.722.174
Belum ditentukan penggunaannya		803.620.909.175	733.602.829.177
Pengukuran kembali imbalan paska kerja	2v, 25	(127.153.177.428)	(114.903.276.811)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		4.818.080.954.173	4.259.719.173.779
Kepentingan non pengendali		86.142.807.110	41.456.737.539
JUMLAH EKUITAS		4.904.223.761.283	4.301.175.911.318
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		8.507.143.315.748	7.301.351.310.259

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
Pendapatan usaha	2q, 31, 40e	2.751.106.508.170	2.408.899.664.963
Beban pokok	2q, 32	(1.353.233.450.038)	(1.111.604.486.594)
Beban pemasaran	2q, 33	(31.817.630.329)	(13.881.712.354)
Beban umum dan administrasi	2q, 34	(320.495.051.550)	(258.381.040.035)
Pendapatan (beban) non usaha - bersih	2q, 35	125.332.904.544	38.263.152.537
LABA USAHA		<u>1.170.893.280.797</u>	<u>1.063.295.578.517</u>
Beban keuangan	2q, 36	(100.799.481.838)	(69.785.045.067)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	2l, 2q, 10, 11, 37	(2.692.531.843)	2.335.831.300
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		<u>1.067.401.267.116</u>	<u>995.846.364.750</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN			
Kini	2t, 22c	(258.945.335.514)	(210.764.590.159)
Tanggungan	2t, 22d	(3.311.119.496)	(51.779.317.481)
LABA TAHUN BERJALAN		<u>805.144.812.106</u>	<u>733.302.457.110</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali program imbalan pasti		(12.249.900.617)	(7.185.195.724)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>792.894.911.489</u>	<u>726.117.261.386</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		791.371.008.558	726.417.633.453
Kepentingan non pengendali		1.523.902.931	(300.372.067)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>792.894.911.489</u>	<u>726.117.261.386</u>
LABA PER SAHAM DASAR	38	<u>465.512</u>	<u>427.304</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS)	Saldo Laba		Pengukuran kembali imbalan paska kerja	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Jumlah
				Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo 1 Januari 2016	511.960.000.000	1.188.040.000.000	538.812.899.239	807.084.784.907	700.396.937.267	(107.718.081.087)	3.638.576.540.326	1.648.548.924	3.640.225.089.250
Laba komprehensif tahun berjalan:									
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	733.602.829.177	-	733.602.829.177	(300.372.067)	733.302.457.110
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	(7.185.195.724)	(7.185.195.724)	-	(7.185.195.724)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	733.602.829.177	(7.185.195.724)	726.417.633.453	(300.372.067)	726.117.261.386
Setoran modal kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	40.160.000.000	40.160.000.000
Pembayaran dividen kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(51.439.318)	(51.439.318)
Pembagian laba tahun 2015:									
Dividen dan lainnya	29	-	-	-	(105.275.000.000)	-	(105.275.000.000)	-	(105.275.000.000)
Cadangan umum	29	-	-	595.121.937.267	(595.121.937.267)	-	-	-	-
dana PKBL	29	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2016	511.960.000.000	1.188.040.000.000	538.812.899.239	1.402.206.722.174	733.602.829.177	(114.903.276.811)	4.259.719.173.779	41.456.737.539	4.301.175.911.318
Saldo 1 Januari 2017	511.960.000.000	1.188.040.000.000	538.812.899.239	1.402.206.722.174	733.602.829.177	(114.903.276.811)	4.259.719.173.779	41.456.737.539	4.301.175.911.318
Laba komprehensif tahun berjalan:									
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	803.620.909.175	-	803.620.909.175	1.523.902.931	805.144.812.106
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	(12.249.900.617)	(12.249.900.617)	-	(12.249.900.617)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	803.620.909.175	(12.249.900.617)	791.371.008.558	1.523.902.931	792.894.911.489
Setoran modal kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	43.223.000.000	43.223.000.000
Pembayaran dividen kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(60.824.537)	(60.824.537)
Penyesuaian kepentingan non pengendali	-	-	-	8.823	-	-	8.823	(8.823)	-
Pembagian laba tahun 2016:									
Dividen dan lainnya	29	-	-	-	(220.081.000.000)	-	(220.081.000.000)	-	(220.081.000.000)
Penyesuaian	-	-	(12.928.236.987)	-	-	-	(12.928.236.987)	-	(12.928.236.987)
Cadangan umum	29	-	-	513.521.829.177	(513.521.829.177)	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2017	511.960.000.000	1.188.040.000.000	525.884.662.252	1.915.728.560.174	803.620.909.175	(127.153.177.428)	4.818.080.954.173	86.142.807.110	4.904.223.761.283

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak**Laporan Arus Kas Konsolidasian**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		2.826.363.775.992	2.429.657.704.271
Penerimaan kas lain-lain		125.332.904.544	125.740.190.155
Pembayaran ke pemasok, karyawan dan lainnya		(664.730.130.724)	(687.941.218.872)
Pembayaran pajak penghasilan		(249.992.060.520)	(238.688.780.222)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI			
AKTIVITAS OPERASI		<u>2.036.974.489.291</u>	<u>1.628.767.895.332</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pengeluaran investasi		(271.307.468.157)	(376.351.000.000)
Perolehan aset tetap dan properti investasi		(2.123.193.209.819)	(948.206.531.626)
Penjualan aset tetap		1.135.859.091	4.159.309.980
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK			
AKTIVITAS INVESTASI		<u>(2.393.364.818.885)</u>	<u>(1.320.398.221.646)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan utang obligasi		-	995.770.735.699
Penerimaan dari lembaga keuangan lainnya		374.000.000.000	-
Pembayaran utang bank		(68.250.000.000)	(447.612.206.500)
Beban keuangan		(100.799.481.838)	(69.976.407.713)
Penambahan modal disetor pada entitas anak		43.223.000.000	40.160.000.000
Pembayaran dividen non pengendali		(60.824.537)	-
Pembayaran dividen dan lainnya	29	(220.081.000.000)	(105.326.439.318)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN		<u>28.031.693.625</u>	<u>413.015.682.168</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(328.358.635.969)	721.385.355.854
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS		2.200.769.796.594	1.479.384.440.740
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS		<u><u>1.872.411.160.625</u></u>	<u><u>2.200.769.796.594</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dahulu pada masa penjajahan Belanda adalah sebuah Perusahaan dengan nama “*Haven Badrift*”. Selanjutnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1969 Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP. Pada periode tahun 1969 sampai dengan tahun 1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada tahun 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 November 1994, tambahan No. 87.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan akta notaris nomor 207 tanggal 30 Juni 2014 oleh Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, mengenai Rinalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang berisi peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05403.40.20.2014 tertanggal 11 Juli 2014.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah melakukan usaha dibidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
- Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, petikemas, curah cair, curah kering (*general cargo*) dan kendaraan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, penumpang, pelayanan rakyat dan Ro-Ro;
- Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda;
- Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi limbah serta pembuangan sampah;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
- Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
- Pengusahaan dan penyelenggaraan depo petikemas dan perbaikan, *cleaning*, fumigasi serta pelayanan logistik;
- Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara;

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Kegiatan usaha lainnya tersebut meliputi jasa angkutan, jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan, jasa perawatan kapal dan peralatan dibidang pelabuhan, jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*ship to ship transfer*), properti diluar kegiatan utama kepelabuhanan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan kehotelan, jasa konsultan dan *surveyor* kepelabuhanan, jasa komunikasi dan informasi, jasa konstruksi kepelabuhanan, jasa *forwarding*/ekspedisi, jasa kesehatan, perbekalan dan catering, tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle* bus, jasa penyelaman, jasa *tally*, jasa pas pelabuhan dan jasa timbangan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

c. Wilayah Kerja

Pembagian wilayah kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

Wilayah	Cabang/Unit Kerja
Wilayah Sumatera Utara	Pelabuhan Belawan dan Perwakilan Pangkalan Brandan/Susu Belawan International Container Terminal (BICT) Unit Galangan Kapal Terminal Petikemas Domestik Belawan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Pelabuhan Sibolga Pelabuhan Gunung Sitoli Pelabuhan Kuala Tanjung
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	Pelabuhan Dumai dan Perwakilan Bagan Siapi-api dan Perwakilan Bengkalis Pelabuhan Pekanbaru Pelabuhan Tembilahan, Perwakilan Rengat dan Perwakilan Kuala Enok Pelabuhan Tanjung Pinang, Perwakilan Sei Kolak Kijang dan Perwakilan Tanjung Uban Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Perwakilan Selat Panjang Pelabuhan Sei Pakning Pelabuhan Batam dan Perwakilan Pulau Sambu
Wilayah Aceh	Pelabuhan Malahayati dan Perwakilan Meulaboh Pelabuhan Lhokseumawe dan Perwakilan Kuala Langsa

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan, Sumatera Utara.

d. Penawaran Umum

Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016

Pada tanggal 10 Juni 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-281/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum obligasi Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah utang obligasi yang belum dilunasi atau belum jatuh tempo sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Obligasi	Jumlah (Rp)	Tenor (Tahun)	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Obligasi Seri A	50.000.000.000	3	21/06/2016	21/06/2019
2.	Obligasi Seri B	500.000.000.000	5	21/06/2016	21/06/2021
3.	Obligasi Seri C	400.000.000.000	7	21/06/2016	21/06/2023
4.	Obligasi Seri D	50.000.000.000	10	21/06/2016	21/06/2026

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Karyawan

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H, susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Sapto Amal Damandari
Komisaris	: Djarot Sri Sulistyio
	: Djoko Sasono
	: Bambang Setyo Wahyudi
	: Winata Supriatna

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 31 Agustus 2016 dan Akta No. 1 tanggal 4 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H, susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Komisaris Utama	: M. Nawawiy Lubis
Komisaris	: Umar Aris
	: Zulfahmi Rizal
	: Djarot Sri Sulistyio
Komisaris Independen	: Icu Zulkafril

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Karyawan (lanjutan)

Direksi

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 31 Agustus 2016 dan Akta No. 1 tanggal 4 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H, susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Bambang Eka Cahyana
Direktur : Syahputera Sembiring
: Iman A. Sulaiman
: Farid Luthfi
: M. Hamied Wijaya

Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.33 tahun 2017 tanggal 04 Desember 2017 dan SK Dewan Komisaris Nomor KP.02 tahun 2017 tentang Perpanjangan masa tugas sebagai anggota Komite Audit an. Lidya Noor Haryanto, susunan Komite Audit per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua : Djarot Sri Sulistyono
Wakil Ketua : Djoko Sasono
Anggota : Rudy Hartono
: Lidya Noor Haryanto

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.25 tahun 2012 dan KP.01 tahun 2014, susunan Komite Audit per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua : Icu Zulkafril
Wakil Ketua : Djarot Sri Sulistyono
Anggota : Ambal Lubis
: Lidya Noor Haryanto

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP. 31 tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan SK Dekom PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KP.09 tahun 2017 perihal perpanjangan masa tugas an. Denny Purwanto sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua : Bambang Setyo Wahyudi
Anggota : Bambang Prio Djatmiko
: Denny Purwanto

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.13 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014, susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua : Umar Haris
Wakil Ketua : Zulfahmi Rizal
Anggota : Armen Lubis
: Denny Purwanto

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.15 tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua : Winata Supriatna
Anggota : Ambal Lubis
: Imron Eryandi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.03 tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Nawawiy Lubis
Anggota : Icu Zulkafril
: Imron Eryandi

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Karyawan (lanjutan)

Audit Internal

Dalam memastikan operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar, diperlukan fungsi Audit Internal yang bekerja secara independen membantu Direktur Utama dalam pengawasan dan pengendalian. Fungsi Audit Internal Perusahaan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Pembentukan SPI oleh Perusahaan didasarkan pada (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 67 ayat 1 (2) Keputusan Pemerintah RI No. 12 tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perusahaan, tercantum pada bab III Satuan Pengawasan Intern Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dan (3) Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal pasal 2 ayat 1.

Kepala SPI per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Arif Hutomo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.32/5/11/PI-14.TU tanggal 16 Juni 2014.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Muhammad Eriansyah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.32/2/22/PI-16.TU tanggal 11 Februari 2016.

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Komisaris dan Direksi untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.471.959.748 dan Rp14.381.855.927.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan mempunyai masing-masing 1.427 dan 1.141 karyawan tetap (tidak diaudit).

f. Struktur Entitas Anak, Pengendalian Bersama dan Entitas Asosiasi

Entitas anak, pengendalian bersama dan entitas asosiasi per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Entitas	Domisili	Jenis Usaha	Mulai	Persentase Kepemilikan	Total Aset (dalam jutaan Rupiah)	
			Kegiatan Komersial		2017	2016
<u>Anak</u>						
PT Prima Indonesia Logistik	Medan	Jasa Logistik	2014	99	148.564	80.713
PT Prima Pengembang Kawasan*	Medan	Kawasan Industri		90	853.228	9.311
PT Prima Husada Cipta Medan	Medan	Kesehatan	2017	99,68	23.986	-
<u>Pengendalian Bersama</u>						
PT Prima Terminal Petikemas*	Medan	Jasa Pelayanan		70	1.071.632	419.804
PT Prima Multi Terminal*	Medan	Terminal <i>Multi Purpose</i>		55	3.196.113	1.005.978
<u>Entitas Asosiasi</u>						
PT Terminal Petikemas Indonesia*	Jakarta	Kepelabuhanan		25	135.742	142.519

*) belum beroperasi secara komersial

PT Prima Indonesia Logistik

PT Prima Indonesia Logistik didirikan berdasarkan akta No. 34 yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 26 September 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27882.40.10.2014 tanggal 6 Oktober 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 15 dan 16 yang dibuat di hadapan Notaris Hapizo, S.H., Notaris di Medan tertanggal 16 Desember 2015 mengenai penambahan modal disetor dan pergantian pengurus (komisaris) Perusahaan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-3599821.AH.01.11.TAHUN 2015. Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa depo peti kemas dan jasa logistik lainnya dengan pelayanan prima. Kegiatan operasional dimulai sejak tahun 2014.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Indonesia Logistik adalah sebesar Rp67.320.000.000 di tahun 2017 dan 2016 atau sebesar 99%, sedangkan 1% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan (KOPKARPEL UTPK).

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

f. Struktur Entitas Anak, Pengendalian Bersama dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

PT Prima Pengembang Kawasan

PT Prima Pengembang Kawasan didirikan berdasarkan akta No.15 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 8 September 2015 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-2455231.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 9 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan tertanggal 21 November 2016 mengenai pergantian Direktur Perusahaan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0103276 tanggal 29 November 2016. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No. KU.60/1/20/PPK-16 tanggal 1 Desember 2016, Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui penambahan modal dasar dan modal disetor pada tahun 2016.

Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2015. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyediakan jasa dengan melakukan kegiatan usaha utama antara lain: Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri, meliputi pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya, seperti pabrik, gudang dan kegiatan terkait; Jasa pembangunan dan pengelolaan kawasan industri; Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Pengembangan Kawasan adalah sebesar Rp759.000.000.000 dan Rp369.000.000.000 di tahun 2017 dan 2016 atau sebesar 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% dimiliki oleh PT Prima Multi Terminal.

PT Prima Husada Cipta Medan

PT Prima Husada Cipta Medan didirikan berdasarkan akta No. 4 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 8 November 2016 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0052052.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir kali diubah melalui akta No. 15 tanggal 21 November 2017 yang dibuat dihadapan notaris Risna Rahmi Arifa, SH, perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0161958.AH.01.11 tanggal 20 Desember 2017. Kegiatan operasional dimulai pada tahun 2017.

Sesuai dengan pasal 3, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa kesehatan: Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Balai Pengobatan, serta usaha terkait.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Husada Cipta Medan adalah sebesar Rp15.840.000.000 di tahun 2017 atau sebesar 99,68%, sedangkan 0,32% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I Medan.

PT Prima Terminal Petikemas

PT Prima Terminal Petikemas didirikan berdasarkan akta No. 162 yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 20 Juli 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris No. 73 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan tertanggal 30 November 2015 dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03.0991253 tanggal 24 Desember 2015. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. UM.50/4/17/PTP-15 tanggal 18 Desember 2015, Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui penambahan modal disetor pada tahun 2016, namun RUPS tersebut belum dituangkan dalam akta notaris. Kegiatan operasional dimulai pada tahun 2013.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah menyediakan jasa pelayanan terminal petikemas internasional.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Terminal Petikemas adalah sebesar Rp436.501.000.000 dan Rp259.000.000.000 tahun 2017 dan 2016 atau sebesar 70%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Wijaya Karya sebesar 15% dan PT Utama Karya sebesar 15% dengan tujuan pengendalian bersama.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

f. Struktur Entitas Anak, Pengendalian Bersama dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

PT Prima Multi Terminal

PT Prima Multi Terminal didirikan berdasarkan akta No. 04 yang dibuat di hadapan Tuti Sumarni, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 September 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-26883.40.10.2014 tanggal 29 September 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 20 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan tertanggal 22 November 2016 mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor Perusahaan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0023804.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 13 Desember 2016.

Maksud dan tujuan Perusahaan ini untuk menyediakan jasa pelayanan Terminal *Multi Purpose* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Terminal Kuala Tanjung dalam rangka menyukseskan Program MP3EI Sei Mangke dan tuntutan pasar atas keberadaan Terminal Curah Cair/Terminal *Multi Purpose* yang terbuka untuk umum.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Multi Terminal adalah sebesar Rp724.548.000.000 dan Rp559.548.000.000 tahun 2017 dan 2016 atau sebesar 55%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar 30% dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 15% dengan tujuan pengendalian bersama.

PT Terminal Petikemas Indonesia

PT Terminal Petikemas Indonesia didirikan berdasarkan akta No. 36 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.K, Notaris di Jakarta pada tanggal 10 April 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-21873.AH.01.01.tahun 2013 tanggal 24 April 2013 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 1 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.K, Notaris di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2016 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor No. AHU-AH.01.03-0104991 tanggal 05 Desember 2016.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah bergerak di bidang kegiatan perusahaan di pelabuhan.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Terminal Petikemas Indonesia adalah sebesar Rp37.500.000.000 atau sebesar 25%.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun dan diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018.

Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Konsolidasian Perusahaan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Konsolidasian telah mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7 (revisi 2012) tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".

b. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*) dan pengukuran lain yang disebutkan pada masing-masing akun.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan investasi sementara yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

c. Prinsip - Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak yang dalam pengendalian Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara Entitas Anak di dalam Entitas Induk dieliminasi dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali dinyatakan secara khusus.

Kepentingan Non Pengendali atas Laba (Rugi) bersih dan ekuitas Entitas Anak dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas Laba (Rugi) bersih dan ekuitas Entitas Anak tersebut.

Penyertaan pada Entitas Anak yang dikonsolidasi seperti dijelaskan pada catatan 1f.

d. Perubahan Standar Akuntansi

Perubahan Standar dan interpretasi berikut berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018:

- PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73, "Sewa"
- PSAK No. 62 (Amandemen 2017), "Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 13 (Amandemen 2017), "Properti Investasi"
- PSAK No. 53 (Amandemen 2017), "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan pada Entitas Lain"
- ISAK No. 32, "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"
- ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan.

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Liabilitas keuangan Perusahaan terutama terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang obligasi.

1. Klasifikasi

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Tersedia untuk dijual;
- iii. Dimiliki hingga jatuh tempo;
- iv. Pinjaman yang diberikan dan piutang;

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

- i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Instrumen keuangan dengan kategori untuk diperdagangkan adalah instrumen keuangan yang diperoleh atau dimiliki Perusahaan terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga atau suku bunga dalam jangka pendek atau untuk lindung nilai instrumen *trading book* lainnya.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Klasifikasi (lanjutan)

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan yang tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif dan Perusahaan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan non-derivatif yang tidak dimiliki Perusahaan untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. Pengakuan

Perusahaan pada awalnya mengakui pinjaman yang diberikan dan piutang pada tanggal perolehan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Perusahaan memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Perusahaan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

3. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

4. Pengukuran Nilai Wajar

Mulai tanggal 1 Januari 2015, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Perusahaan mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Perusahaan berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

Sebelum 1 Januari 2015, nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*) pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan aktif dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*). Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang dapat diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Perusahaan mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang Perusahaan yakin bahwa keterlibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

Aset keuangan dan posisi *long* diukur menggunakan harga penawaran; liabilitas keuangan dan posisi *short* diukur menggunakan harga permintaan. Jika Perusahaan memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka Perusahaan dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka bersih (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

5. Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

6. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

f. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Piutang Usaha dan Piutang Non Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang non usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perusahaan.

Piutang usaha dan piutang non usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Perusahaan menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dengan menggunakan metode *Roll Rate Model*. Metode ini juga dikenal sebagai *Migration Analysis* atau *Flow Model*, menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan (*roll rate average*) dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

g. Piutang Usaha dan Piutang Non Usaha (lanjutan)

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam “beban penurunan nilai”. Ketika piutang usaha dan piutang non usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap “beban penurunan nilai” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam hal ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dan entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - iv. Entitas tersebut adalah penyelenggara suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - v. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vi. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan harga terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Untuk persediaan rusak, seluruh atau sebagian telah usang, atau harga jualnya telah menurun, serta jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat maka nilai persediaan diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap item atau kelompok item dalam persediaan yang serupa atau berkaitan. Selisih yang timbul akibat penurunan nilai persediaan dibebankan langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada pos “pendapatan/(beban) lain-lain”.

Persediaan rusak, alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok “aset lain-lain”.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

j. Biaya dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka adalah pengeluaran-pengeluaran yang telah terjadi namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode disaat manfaatnya diterima. Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Penyertaan pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan melalui kepemilikan hak suara antara 20% sampai dengan 50%. Investasi pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai investasi diakui sejumlah nilai perolehan ditambah atau dikurang dengan bagian atas laba atau rugi bersih, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Keberadaan pengaruh signifikan dibuktikan dengan cara masing-masing dewan direksi mewakili setiap pemegang saham. Perusahaan terwakili di dalam dewan direksi melalui penunjukan direktur keuangan. Akta pendirian juga mengakomodasi partisipasi Perusahaan di dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan, dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan.

Perusahaan menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi dalam entitas asosiasi. Perusahaan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba atau rugi.

l. Pengaturan Bersama

Perlakuan akuntansi atas ventura bersama Perusahaan dan entitas anak sesuai dengan PSAK 66 - Pengaturan Bersama, dan PSAK 15 (revisi 2013): Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Pengaturan bersama dapat berbentuk ventura bersama dan operasi bersama. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Sedangkan operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Mengacu PSAK 66 tersebut, manajemen saat ini memiliki investasi kepada ventura bersama.

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada perjanjian, berupa penyerahan dana kepada pengelola dengan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian membentuk pengendalian bersama. Pengelola proyek ini melaksanakan kegiatan pembangunan proyek yang berasal dari pemberi kerja (owner) dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama.

Sesuai dengan PSAK 15 (revisi 2013), penyertaan pada ventura bersama dicatat dengan metode ekuitas.

m. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti Investasi dinyatakan berdasarkan model biaya yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (2-50 tahun). Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

m. Properti Investasi (lanjutan)

Transfer ke properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

n. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan yang mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sesuai dengan PSAK 16, Perusahaan memilih metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat dikurangi nilai residunya.

Pengelompokan persentase penyusutan dan umur aset adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	% Penyusutan	
	/ tahun	Nilai Sisa
Bangunan dan prasarana	2 - 5	Rp1.000.000 atau 2%
Kapal	5 - 10	2%
Alat Fasilitas Pelabuhan	5 - 20	2%
Peralatan	5 - 25	2%
Kendaraan	20	20%
Emplasmen	25	Rp1.000.000 atau 2%

Nilai residu aset tetap dikaji ulang, dan telah disesuaikan pada setiap tanggal laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan telah melakukan pengkajian ulang atas nilai sisa dimana nilai sisa yang baru dihitung dari persentase tertentu dari harga perolehan kecuali untuk kolam pelabuhan, penahan gelombang, lapangan penumpukan, jalan, jembatan, lapangan parkir dan taman. Sebelumnya nilai sisa dari aset tetap adalah Rp0 (nihil).

Tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasikan sepanjang umur hukum hak.

Biaya perbaikan dan perawatan aset untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai, kegunaan dan masa manfaat dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

Aset yang tidak dipergunakan lagi, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dipindahkan ke akun aset tetap tidak berfungsi dalam akun aset lain-lain pada kelompok aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai residunya. Aset tetap yang belum digunakan dicatat sebesar biaya perolehan pada akun aset tetap belum dimanfaatkan dalam kelompok aset tidak lancar.

Transaksi sewa digolongkan sebagai sewa pembiayaan (*financial lease*) apabila memenuhi semua kriteria yang diisyaratkan (disajikan sebagai bagian dalam aset tetap). Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa dikelompokkan sebagai transaksi sewa operasi (*operating lease*). Aset sewa dengan sewa pembiayaan dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa selama masa sewa ditambah nilai sisa yang harus dibayar pada akhir masa sewa. Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai angsuran pokok.

Kewajiban sewa dan beban bunga. Penyusutan atas aset yang disewa dengan sewa pembiayaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aset tetap yang bersangkutan.

Nilai aset yang dapat dipulihkan diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan kembali sesuai PSAK No. 48 "Penurunan Nilai Aset". Penurunan nilai aset diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

n. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap yang belum dan/atau tidak produktif diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tetap tidak produktif pada kelompok aset lain-lain dan diukur sebesar nilai tercatatnya. Mengacu pada SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) Nomor KU.60/2/9/PI -12, Nomor HK.56/5/12/PI.II-11, Nomor HK.04/19/P.III-2011, dan Nomor 1/HK.104/DUT-2012 tanggal 30 Desember 2011 batasan minimum pengeluaran pemeliharaan aset tetap yang dapat dikapitalisasi diatur sebagai berikut:

Jenis Aset	Batas minimum kapitalisasi (% dari Replacement Cost)
Bangunan fasilitas pelabuhan	2
Kapal	2
Alat-alat fasilitas pelabuhan	5 - 20
Instalasi fasilitas pelabuhan	4 - 10
Tanah, jalan, dan bangunan	3 - 10
Peralatan	4 - 25
Kendaraan	20
Emplasemen	4 - 34

Bunga dan biaya pinjaman lain yang langsung digunakan dalam membiayai konstruksi aset tetap, dikapitalisasikan sampai dengan saat aset tetap telah siap dipakai. Bunga dan biaya pinjaman yang timbul setelah aset tetap tersebut siap digunakan dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan dikurangi penghasilan investasi dari investasi temporer pinjaman tersebut.

Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman yang dapat diterapkan atas saldo pinjaman selama periode berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut.

o. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset bersangkutan.

Seluruh aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasikan. Jumlah yang dapat disusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas yaitu biaya perolehan.

Amortisasi atas aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus. Metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan. Umur manfaat untuk aset tidak berwujud adalah 2, 5, dan 10 tahun.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia.

Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (*valuation multiples*) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia. Kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan usaha jasa kepelabuhanan diakui pada saat kegiatan pelayanan jasa telah selesai dilakukan (*accrual basis*). Kegiatan jasa pelayanan yang telah selesai dilakukan sampai dengan akhir periode yang belum diterbitkan nota tagihannya dicatat sebagai pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan sewa aset tetap diakui pada saat timbulnya hak sewa bagi penyewa sesuai masa kontrak sewa. Pendapatan usaha galangan kapal dan pelayanan rumah sakit diakui pada saat jasa telah selesai diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

r. Sewa

Perlakuan akuntansi atas sewa Perusahaan dan Entitas Anak sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011) - Sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Klasifikasi sewa sebagai pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa.
2. *Lessee* mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan.
4. Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, dan;
5. Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

Indikator dari situasi yang secara individual atau gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

1. Jika *lessee* dapat membatalkan sewa, maka rugi *lessor* yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh *lessee*.
2. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada *lessee* (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa), dan
3. *Lessee* memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.

s. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jika Perusahaan meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Perusahaan menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

s. Biaya Pinjaman (lanjutan)

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Perusahaan menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan (jika ada) juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

u. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disajikan dalam Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Kurs tengah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Dolar Amerika Serikat (USD)	13.554	13.436

v. Imbalan Kerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan Perusahaan. Program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada periode kini dan sebelumnya.

Kewajiban imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, yang disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh temponya kurang lebih sama dengan kewajiban yang bersangkutan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui pada beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi yang mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Sebelum penerapan PSAK 24 (revisi 2013), keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial yang melebihi dari jumlah yang lebih besar antara 10% nilai wajar aset program atau 10% nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari para pekerja yang berhak. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi, kecuali perubahan pada program pensiun tergantung pada kondisi pekerja memberikan jasanya selama periode tertentu (*periode vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk karyawan yang memenuhi syarat. Kontribusi didanai dan dibayar oleh Perusahaan dan karyawan. Selain itu, Perusahaan juga memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

w. Laba Komprehensif Per Saham

Sesuai PSAK No. 56, tentang laba per saham, laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham masing-masing sebesar 1.700.000 lembar saham untuk tahun 2017 dan tahun 2016.

x. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerjanya lebih difokuskan pada kategori masing-masing jasa.

y. Kerjasama Mitra Usaha

Pendapatan kontrak kerjasama operasi yang mencakup dan memenuhi kriteria perjanjian konsesi jasa pembangunan atau peningkatan kemampuan, berupa aset keuangan atau aset tak berwujud, diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima.

Pendapatan dan beban kontrak diakui berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Taksiran rugi yang timbul karena jumlah biaya kontrak melebihi jumlah pendapatan kontrak diakui sebagai beban. Jumlah kerugian tersebut ditentukan tanpa memperhatikan pekerjaan telah atau belum dilaksanakan, tahap penyelesaian aktivitas kontrak dan jumlah taksiran laba yang akan diperoleh dari kontrak lain yang tidak diperlakukan sebagai satu proyek tunggal konstruksi.

Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

z. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Aset tetap

Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya dan disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Biaya perolehan meliputi nilai wajar aset dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tetap bersangkutan dalam kondisi siap digunakan sesuai keinginan dan maksud manajemen. Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti serah terima.

Apabila aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah tidak dapat diukur dengan nilai wajar maka biaya perolehannya diukur sesuai dengan nilai transaksi pasar yang serupa.

Penvertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diperoleh dari donasi Pemerintah dicatat secara terpisah dari modal saham Perusahaan dan diakui sebesar nilai wajar kas dan/atau aset keuangan dan/atau aset non keuangan yang diterima.

PMN berupa aset yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti obyektif bahwa Perusahaan telah memenuhi kondisi dan persyaratan donasi tersebut dan donasi tersebut akan diperoleh.

PMN berupa aset dan didukung oleh berita acara serah terima diakui bagian dari ekuitas sebagai bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sampai dengan Peraturan Pemerintah atas PMN tersebut sudah terbit.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi, tidak terdapat pertimbangan kritis yang mempunyai efek yang signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari yang sudah dijelaskan di bawah ini.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

i. Penurunan Nilai Piutang

Perusahaan membuat penyisihan penurunan nilai piutang berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang. Penyisihan dibentuk terhadap piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta beban penurunan nilai piutang tak tertagih pada periode perubahan estimasi tersebut terjadi.

ii. Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Umur manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

iii. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai atau kemungkinan untuk pemulihan atas penurunan nilai yang telah dicatat sebelumnya. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi (lanjutan)

iv. Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

v. Penentuan Biaya Pensiun dan Liabilitas Imbalan Kerja

Beban dari program pensiun imbalan pasti dan nilai kini dari kewajiban pensiun ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Penilaian aktuaris mencakup penentuan asumsi yang bervariasi yang antara lain terdiri dari, tingkat diskonto, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian. Setiap perubahan dari asumsi tersebut akan berdampak terhadap nilai tercatat dari kewajiban pensiun. Oleh karena kompleksitas dari penilaian yang dilakukan, asumsi terkait dan sifatnya yang jangka panjang, kewajiban pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi.

Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi Perusahaan sudah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Perusahaan atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi telah ditelaah pada setiap tanggal perolehan.

4. Kas dan Setara Kas

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Kas	1.548.608.140	1.300.721.422
Bank		
Pihak berelasi		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	93.416.885.469	156.193.367.961
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.795.828.872	54.912.903.732
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.834.237.419	243.791.247.404
PT Bank Syariah Mandiri	5.001.030.355	-
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.108.198.264	2.872.115.539
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	84.969.715	698.669.450
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	487.054.758	132.194.924
Jumlah Pihak Berelasi	142.728.204.852	458.600.499.010
Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.795.876.104	3.164.762.576
PT Bank Bukopin Tbk	427.774.601	273.341.563
PT Bank Permata Syariah	7.510.035	376.931.543
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	43.223.476
Jumlah Pihak Ketiga	2.231.160.740	3.858.259.158
Jumlah Bank	144.959.365.592	462.458.758.168

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

4. Kas dan Setara Kas (lanjutan)

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Deposito		
Pihak berelasi		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	755.805.809.398	633.126.890.425
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	402.773.853.968	252.663.375.012
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	312.286.101.976	402.688.574.088
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	65.730.534.995	62.189.507.664
PT Bank Tabungan Negara Syariah	21.955.170.526	51.759.032.075
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	87.187.100.000	206.242.600.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	67.000.000.000	67.180.000.000
Jumlah Pihak Berelasi	1.712.738.570.863	1.675.849.979.264
Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	42.000.000.000
PT Bank Permata Syariah	-	11.306.711.654
PT Bank Bukopin Tbk	2.500.000.000	2.500.000.000
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	10.664.616.030	5.353.626.086
Jumlah Pihak Ketiga	13.164.616.030	61.160.337.740
Jumlah Deposito	1.725.903.186.893	1.737.010.317.004
Kas dan Setara Kas	1.872.411.160.625	2.200.769.796.594

Tingkat bunga deposito per tahun adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Rupiah	3,1% - 8%	5,5% - 7%
Dolar Amerika Serikat	0,5% - 1%	0,5% - 1%

Pendapatan bunga atas deposito dan giro Perusahaan masing-masing pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 and 2016 adalah Rp98.026.883.778 dan Rp79.406.219.155 (Catatan 35).

5. Piutang Usaha

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Pihak berelasi		
<u>Rupiah</u>		
PT Pertamina Trans Kontinental	10.746.642.668	11.218.473.988
PT Prima Multi Terminal	9.637.301.250	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.614.012.978	-
PT Sarana Agro Nusantara	5.433.414.192	-
PT Perta Arun Gas	5.268.527.238	-
PT Kereta Api Logistik	1.563.614.000	-
PT Pertamina (Persero)	1.217.221.649	1.775.166.671
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1.160.894.337	617.259.681
PT Semen Padang	1.154.273.207	-
PT Arun NGL	221.939.700	1.906.808.930
PT Pertamina UPPDN I	-	3.705.638.499
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	3.909.895.693	2.703.797.227
Jumlah Rupiah	45.927.736.912	21.927.144.996
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	1.182.044.310	1.200.782.575
Jumlah Dolar Amerika Serikat	1.182.044.310	1.200.782.575
Jumlah pihak berelasi	47.109.781.222	23.127.927.571

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

5. Piutang Usaha (lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Cemindo Gemilang	7.103.945.478	-
PT Godwin Austen Indonesia	7.010.525.712	3.772.105.855
PT Oiltanking Karimun	6.434.683.712	-
PT Bintang Samudera Utama	4.615.230.171	3.712.348.681
PT Handa Terminal	4.390.036.497	-
PT Rizkia Armada Nusantara	4.389.576.217	5.678.631.061
PT Bhandha Ghara Reksa	4.133.152.162	-
CV Khoda	4.000.027.500	-
PT Snepac Shipping	3.481.519.828	2.045.100.048
PT Musim Mas	3.330.483.652	-
PT Ekadura Indonesia	3.160.518.768	-
PT Salam Pacific Indonesia Line	2.933.249.844	-
PT Cuaca Marina Servicatama	2.874.300.229	2.827.238.151
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk	2.733.680.968	-
PT Usda Seroja Jaya	2.679.284.415	3.017.525.583
PT Maxsteer Drynusa Perdana	2.657.572.221	-
PT Meratus Line	2.500.238.728	-
PT Shohibul Barokah	2.490.978.747	2.490.978.747
PT Bahari Sandi Pratama	2.479.208.675	-
PT Pelayaran Batam Samudera	2.467.722.004	-
PT Citra Pase Indah	2.369.174.469	-
PT Kreasi Jaya Adhikarya	2.296.374.965	-
PT Asia Sinergi Lintas Nusa	2.288.127.208	-
PT Citra Abadi Marine Indonesia	2.241.466.001	-
PT Lafarge Cement Indonesia	2.225.222.109	-
PT Tri Eka Line	2.162.961.436	-
PT Pancaran Jatinusa	2.143.871.054	-
PT Nagamas Palmoil Lestari	2.014.884.194	2.002.880.583
PT Tanjung Putra Maritim	1.963.208.757	-
PT Cahaya Lautan Niaga	1.827.450.497	-
PT The Nasional Global	1.726.130.796	-
PT Armada Maritim Nusantara	1.569.677.431	-
PT Ivo Mas Tunggal	1.546.838.970	2.669.124.587
PT Guntur Line	1.513.593.735	-
PT Tirta Nusapersada	1.447.483.080	-
PT Caraka Tirta Perkasa	1.431.812.866	-
PT Pelayaran Cahaya Papua	1.339.208.690	-
PT Medan Sugar Industry	1.335.736.831	-
PT Holcim Indonesia Tbk	1.218.707.291	-
PT Gresik Cipta Sejahtera	1.194.004.664	-
PT Garuda Mahakam Pratama	1.168.404.348	-
PT Barakomindo Shipping	1.099.008.357	-
PT Intibenua Perkasatama	1.095.946.651	784.638.166
PT Nur Sembilan Logistical	1.072.757.475	-
PT Sufie Bahari Lines	1.068.915.168	-
PT Kanaka Lines	1.041.580.989	-
PT Sandico Ocean Line	1.015.307.120	-
Jumlah dipindahkan	119.283.790.680	29.000.571.462

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

5. Piutang Usaha (lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Jumlah dipindahkan	119.283.790.680	29.000.571.462
PT Dobel Mas	-	2.021.819.800
PT Bintika Bangun Nusa	-	1.923.974.315
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	56.740.093.693	82.678.051.903
Jumlah Rupiah	176.023.884.373	115.624.417.480
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Citra Abadi Marine Indonesia	2.228.679.001	2.234.439.718
PT Tri Eka Lines	1.734.591.362	1.839.870.646
PT The Nasional Global	1.719.943.006	1.976.768.813
PT Cuaca Marina Service Utama	1.661.780.433	1.666.075.824
PT Sandico Ocean Line	1.484.651.174	1.488.488.694
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	3.209.297.251	4.167.507.030
Jumlah Dolar Amerika Serikat	12.038.942.227	13.373.150.725
Jumlah pihak ketiga	188.062.826.600	128.997.568.205
Jumlah Piutang Usaha	235.172.607.822	152.125.495.776
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(34.593.747.427)	(26.803.903.203)
Piutang Usaha Bersih	200.578.860.395	125.321.592.573

Piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Lancar	111.702.690.808	68.376.092.714
1 hari - 30 hari	40.653.408.321	27.754.707.470
31 hari - 60 hari	51.283.927.249	20.838.803.385
61 hari - 90 hari	8.829.055.139	9.115.743.784
91 hari - 180 hari	5.795.200.819	8.309.455.406
181 hari - 365 hari	3.356.006.615	14.213.151.926
> 365 hari	13.552.318.871	3.517.541.091
Jumlah	235.172.607.822	152.125.495.776
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(34.593.747.427)	(26.803.903.203)
Jumlah Bersih	200.578.860.395	125.321.592.573

Mutasi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Saldo awal	(26.803.903.203)	(25.686.409.459)
Pencadangan selama tahun berjalan	(7.789.844.224)	(6.466.291.778)
Pemulihan selama tahun berjalan	-	5.348.798.034
Saldo Akhir	(34.593.747.427)	(26.803.903.203)

Pemulihan selama tahun berjalan merupakan penerimaan atas piutang yang sebelumnya telah dilakukan penurunan nilai, namun setelah dilakukan upaya penagihan piutang tersebut dapat tertagih.

Manajemen berkeyakinan, bahwa penyisihan penurunan piutang usaha tak tertagih cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang di kemudian hari.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

6. Persediaan

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Suku cadang	19.197.127.550	14.865.449.140
Bahan bakar minyak dan pelumas	3.234.859.425	3.626.181.099
Perlengkapan kantor	262.104.542	920.452.552
Obat-obatan	273.826.906	247.216.739
Lain-lain	749.058.552	456.783.594
Jumlah	23.716.976.975	20.116.083.124

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, persediaan tidak diasuransikan, karena manajemen berpendapat bahwa persediaan Perusahaan tidak memerlukan perlindungan asuransi sesuai dengan kondisi persediaan yang ada.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan, Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

7. Uang Muka

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Uang muka	13.533.211.925	10.493.294.616
Jumlah	13.533.211.925	10.493.294.616

Uang muka merupakan uang muka untuk pembelian bahan bakar, uang muka pelaksanaan pekerjaan operasional, dan keperluan operasional kantor.

8. Biaya Dibayar Dimuka

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Biaya dibayar dimuka	1.749.455.476	4.145.276.461
Jumlah	1.749.455.476	4.145.276.461

9. Aset Keuangan Lancar Lainnya

Rincian aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Piutang usaha yang belum difakturkan	66.367.493.703	54.410.007.969
Lainnya :	31.048.557.929	66.087.137.688
- Piutang lain-lain pihak ketiga	32.056.294.787	66.991.014.668
- Piutang pegawai aktif	60.545.622	167.311.500
- Piutang pegawai non aktif	2.562.672.160	2.559.766.160
- Provisi penurunan piutang lain-lain pihak ketiga	(1.068.282.480)	(1.068.282.480)
- Provisi piutang pegawai non aktif	(2.562.672.160)	(2.562.672.160)
Jumlah	97.416.051.632	120.497.145.657

Perusahaan mengakui piutang usaha belum difakturkan berdasarkan pra nota tagihan ketika pemberian jasa telah dilakukan namun belum dibuatkan nota penagihan kepada pelanggan yang bersangkutan.

10. Penyertaan Pada Entitas Asosiasi

Saldo dan mutasi penyertaan pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

2017						
Nama Entitas	%	Nilai Tercatat		Bagian atas Laba		
		Awal tahun	Penambahan	(Rugi) Bersih Entitas Asosiasi	Pembagian Dividen	Nilai Tercatat Akhir Tahun
Metode Ekuitas						
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	35.852.193.160	-	(978.961.210)	-	34.873.231.950
PT Prima Tangki Indonesia	20	8.573.839.624	9.000.000.000	57.440.961	-	17.631.280.585
Jumlah		44.426.032.784	9.000.000.000	(921.520.249)	-	52.504.512.535

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

10. Penyertaan Pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

2016						
Nama Entitas	%	Nilai Tercatat		Bagian atas Laba		Nilai Tercatat Akhir Tahun
		Awal tahun	Penambahan	(Rugi) Bersih Entitas Asosiasi	Pembagian Dividen	
Metode Ekuitas						
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	36.488.271.884	-	(636.078.724)	-	35.852.193.160
PT Prima Tangki Indonesia	20	9.000.000.000	-	(426.160.376)	-	8.573.839.624
Jumlah		45.488.271.884	-	(1.062.239.100)	-	44.426.032.784

PT Terminal Petikemas Indonesia

Pada tanggal 10 April 2013, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Pelabuhan Indonesia II, III dan IV (Persero) untuk mendirikan entitas asosiasi dengan nama PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) dengan penyertaan saham sebesar Rp37.500.000.000 atau sebesar 25% yang dimiliki bersama dengan PT Pelindo II, III dan IV (Persero).

Berdasarkan akta pendirian, masing-masing dewan direksi mewakili setiap pemegang saham. Perusahaan terwakili di dalam dewan direksi melalui penunjukan direktur keuangan. Akta pendirian juga mengakomodasi partisipasi Perusahaan di dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Kegiatan usaha utama TPI adalah kegiatan pengusahaan di Pelabuhan. Pembukuan TPI dimulai pada 1 Januari 2014.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada TPI sebesar Rp34.873.231.950 dan mengakui bagian atas rugi entitas asosiasi sebesar Rp978.961.210 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

Informasi keuangan PT Terminal Petikemas Indonesia adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Total aset	135.742.777.503	140.075.492.381
Total liabilitas	628.126.054	1.044.996.094
Ekuitas	135.114.651.449	139.030.496.287
Pendapatan	-	-
Laba (rugi) bersih	(3.915.844.838)	(2.544.314.897)

PT Prima Tangki Indonesia

Berdasarkan akta Nomor 65 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta pada tanggal 27 April 2016 tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT Prima Indonesia Logistik (PIL) telah menyertakan saham sebanyak 18.000 lembar saham pada entitas asosiasi dengan nama PT Prima Tangki Indonesia (PTI) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.000.000.000 atau sebesar 20% dari jumlah saham PTI.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTI adalah melaksanakan kegiatan usaha berupa penyediaan fasilitas pelabuhan berupa tangki timbun (*tank storage*).

Sampai dengan 31 Desember 2017, PIL memiliki penyertaan saham pada PTI sebesar Rp17.631.280.585 dan mengakui bagian atas laba sebesar Rp57.440.961 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

Informasi keuangan PT Prima Tangki Indonesia adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Total aset	94.085.755.756	44.607.434.872
Total liabilitas	5.929.352.829	59.279.750
Ekuitas	88.156.402.927	44.548.155.122
Pendapatan	-	-
Laba (rugi) bersih	(1.391.752.195)	(451.537.862)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

11. Investasi Entitas Ventura Bersama

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

2017						
Nama Entitas	%	Nilai Tercatat		Bagian atas	Pembagian Dividen	Nilai Tercatat Akhir Tahun
		Awal tahun	Penambahan	Laba (Rugi) Bersih		
Metode Ekuitas						
PT Prima Terminal Petikemas	70	337.632.537.367	100.000.000.000	(4.125.598.699)	-	433.506.938.668
PT Prima Multi Terminal	55	563.126.673.061	165.000.000.000	2.354.587.105	-	730.481.260.166
Jumlah		900.759.210.428	265.000.000.000	-	-	1.163.988.198.834
2016						
Nama Entitas	%	Nilai Tercatat		Bagian atas	Pembagian Dividen	Nilai Tercatat Akhir Tahun
		Awal tahun	Penambahan	Laba (Rugi) Bersih		
Metode Ekuitas						
PT Prima Terminal Petikemas	70	260.543.627.687	77.501.000.000	(412.090.320)	-	337.632.537.367
PT Prima Multi Terminal	55	269.466.512.341	289.850.000.000	3.810.160.720	-	563.126.673.061
Jumlah		530.010.140.028	367.351.000.000	3.398.070.400	-	900.759.210.428

PT Prima Terminal Petikemas

Pada bulan Juli 2013, Perusahaan telah menandatangani “Perjanjian Perusahaan Patungan” (*Joint Venture Agreement*) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero), untuk mendirikan PT Prima Terminal Petikemas (PTP). PTP bergerak dalam bidang penyediaan jasa pelayanan terminal petikemas internasional.

Sampai dengan 31 Desember 2017, nilai investasi Perusahaan pada PT Prima Terminal Petikemas (PTP) sebesar Rp433.506.938.668. Penambahan investasi pada tahun 2017 merupakan tambahan setoran modal yang dilakukan Perusahaan pada PTP dan tidak merubah komposisi kepemilikan per 31 Desember 2017 dengan kepemilikan tetap sebesar 70% serta mengakui bagian atas rugi sebesar Rp4.125.598.699 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

Informasi keuangan PT Prima Terminal Petikemas adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Total aset	1.071.007.502.179	495.573.562.022
Total liabilitas	494.570.732.653	13.242.080.069
Ekuitas	576.436.769.526	482.331.481.953
Pendapatan	-	-
Laba (rugi) bersih	(5.893.712.427)	(588.700.457)

PT Prima Multi Terminal

Pada bulan September 2014, Perusahaan telah menandatangani “perjanjian Perusahaan patungan” (*Joint Venture Agreement*) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, untuk mendirikan PT Prima Multi Terminal (PMT). PMT bergerak dalam bidang pembangunan dan pengoperasian jasa pelayanan terminal curah cair/terminal *multi purpose* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Pelabuhan Kuala Tanjung.

Sampai dengan 31 Desember 2017, nilai investasi Perusahaan pada PT Prima Multi Terminal (PMT) sebesar Rp730.481.260.166. Penambahan investasi pada tahun 2017 merupakan tambahan setoran modal yang dilakukan Perusahaan pada PMT dan tidak merubah komposisi kepemilikan pada PMT per 31 Desember 2017 dengan kepemilikan tetap sebesar 55% serta mengakui bagian atas laba sebesar Rp2.354.587.105 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

11. Investasi Entitas Ventura Bersama (lanjutan)

Informasi keuangan PT Prima Multi Terminal adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Total aset	3.196.113.697.536	1.960.527.008.271
Total liabilitas	1.867.965.951.779	936.660.329.977
Ekuitas	1.328.147.745.757	1.023.866.678.294
Pendapatan	1.060.587.870	1.414.117.160
Labanya (rugi) bersih	4.281.067.463	6.927.564.945

12. Properti Investasi

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

2017					
Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai perolehan					
Tanah	4.843.165.052	181.190.263.569	-	-	186.033.428.621
Bangunan	8.646.308.748	-	-	-	8.646.308.748
Jumlah Nilai Perolehan	13.489.473.800	181.190.263.569	-	-	194.679.737.369
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	4.639.632.667	181.749.005	-	-	4.821.381.672
Jumlah Ak. Penyusutan	4.639.632.667	181.749.005	-	-	4.821.381.672
Nilai Buku	8.849.841.133				189.858.355.697

Penambahan properti investasi pada tahun 2017 merupakan penambahan tanah di Kuala Tanjung milik Entitas Anak PT Prima Pengembang Kawasan.

2016					
Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai perolehan					
Tanah	4.777.574.584	-	-	65.590.468	4.843.165.052
Bangunan	12.048.918.841	-	3.688.351.911	285.741.818	8.646.308.748
Jumlah Nilai Perolehan	16.826.493.425	-	3.688.351.911	351.332.286	13.489.473.800
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	6.609.536.978	321.261.308	2.291.165.619	-	4.639.632.667
Jumlah Ak. Penyusutan	6.609.536.978	321.261.308	2.291.165.619	-	4.639.632.667
Nilai Buku	10.216.956.447				8.849.841.133

Pada tahun 2016, penambahan dari reklasifikasi tanah merupakan tanah di Cabang Kuala Tanjung sebesar Rp54.745.086 yang disewakan kepada pihak lain yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap dan sebesar Rp10.845.382 merupakan pemanfaatan atas tanah di Cabang Kuala Tanjung yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap yang belum dimanfaatkan, sedangkan penambahan bangunan sebesar Rp285.741.818 merupakan renovasi terminal penumpang di Cabang Gunung Sitoli yang direklasifikasi dari aset dalam penyelesaian. Pengurangan harga perolehan bangunan sebesar Rp3.688.351.911 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.291.165.619 merupakan realisasi penghapusan bangunan fasilitas pelabuhan (lihat catatan 13).

Properti investasi telah diasuransikan kepada PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) (lihat catatan 13).

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

13. Aset Tetap

Saldo dan mutasi aset tetap tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi / Penyesuaian	Saldo Akhir
Harga perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	103.022.921.573	11.474.340.988	-	-	114.497.262.561
Bangunan fasilitas					
pelabuhan	1.640.153.003.336	318.089.935.381	(167.239.757)	(17.931.850.623)	1.940.143.848.337
Kapal	585.446.489.595	112.895.863.548	-	(93.495.273.887)	604.847.079.256
Alat fasilitas pelabuhan	1.281.927.818.584	204.459.209.591	-	(60.179.618.814)	1.426.207.409.361
Instalasi fasilitas					
pelabuhan	245.989.337.406	59.265.657.314	-	(2.108.195.818)	303.146.798.902
Jalan dan bangunan	385.120.326.820	41.753.362.419	(141.957.641)	(2.773.124.001)	423.958.607.597
Peralatan	72.270.713.982	417.710.000	-	(144.453.500)	72.543.970.482
Kendaraan	12.231.518.637	789.546.727	(128.200.000)	(322.538.363)	12.570.327.001
Emplasmen	17.602.075.403	41.067.102.728	-	(368.864.364)	58.300.313.767
Sub Jumlah	4.343.764.205.336	790.212.728.696	(437.397.398)	(177.323.919.372)	4.956.215.617.262
Aset dalam penyelesaian	801.083.610.858	1.151.790.217.555	-	(668.994.623.545)	1.283.879.204.868
Harga Perolehan	5.144.847.816.194	1.942.002.946.251	(437.397.398)	(846.318.542.916)	6.240.094.822.131
Akumulasi penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan fasilitas					
pelabuhan	345.087.029.367	59.063.365.264	(254.202.035)	175.914.758	404.072.107.354
Kapal	215.952.144.566	17.252.145.946	-	17.501.966.719	250.706.257.231
Alat fasilitas pelabuhan	538.720.192.604	118.923.665.900	-	(40.157.237.413)	617.486.621.091
Instalasi fasilitas					
pelabuhan	79.267.467.932	12.849.889.224	-	(1.761.782.906)	90.355.574.250
Jalan dan bangunan	142.330.114.092	19.226.575.354	-	(4.101.669.294)	157.455.020.153
Peralatan	54.663.760.601	7.940.899.242	-	(177.397.166)	62.427.262.677
Kendaraan	9.537.373.727	377.088.713	(126.063.294)	(257.000.330)	9.531.398.816
Emplasmen	8.685.209.678	1.820.844.415	-	(372.004.442)	10.134.049.651
Jumlah Akumulasi penyusutan	1.394.243.292.567	237.454.474.058	(380.265.329)	(29.149.210.074)	1.602.168.291.223
Nilai Buku	3.750.604.523.627				4.637.926.530.908

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

13. Aset Tetap (lanjutan)

Saldo dan mutasi aset tetap tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi /	
				Penyesuaian	Saldo Akhir
Harga perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	99.238.331.647	3.839.335.000	-	(54.745.074)	103.022.921.573
Bangunan dan					
Prasarana	3.247.381.598.910	9.536.391.780	(5.381.581.371)	319.256.152.241	3.570.792.561.560
Kapal	511.614.588.579	14.459.541.235	-	59.372.359.781	585.446.489.595
Peralatan	69.711.865.410	-	-	2.558.848.572	72.270.713.982
Kendaraan	11.933.818.637	-	-	297.700.000	12.231.518.637
Sub Jumlah	3.939.880.203.183	27.835.268.015	(5.381.581.371)	381.430.315.520	4.343.764.205.347
Aset dalam penyelesaian	386.953.213.785	854.610.075.379	-	(440.479.678.306)	801.083.610.858
Harga Perolehan	4.326.833.416.968	882.445.343.394	(5.381.581.371)	(59.049.362.786)	5.144.847.816.205
Akumulasi penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan					
Prasarana	979.993.725.036	163.474.225.364	(3.528.504.314)	(26.128.340.398)	1.113.811.105.688
Kapal	214.207.353.391	22.375.488.823	-	(20.630.697.648)	215.952.144.566
Peralatan	50.089.859.024	4.841.861.192	-	(19.051.619)	54.912.668.597
Kendaraan	9.160.916.817	376.456.910	-	-	9.537.373.727
Jumlah Akumulasi penyusutan	1.253.451.854.268	191.068.032.289	(3.528.504.314)	(46.778.089.665)	1.394.213.292.578
Nilai Buku	3.073.381.562.700				3.750.634.523.627

Penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp237.454.474.058 dan Rp191.068.032.289 (lihat catatan 32 dan 34).

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan mengasuransikan aset tetap dan properti investasi terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebesar Rp2.181.576.800.852 dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebesar Rp79.520.895.000, sehingga total nilai pertanggungan pada 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp2.261.097.695.852 yang menurut pendapat manajemen memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan mengasuransikan aset tetap dan properti investasi kepada pihak ketiga PT Jasindo (Persero) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.453.973.947.311, yang menurut pendapat manajemen memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Pada tahun 2016 Perusahaan telah mereklasifikasi yang terdiri dari penambahan dan pengurangan aset tetap. Penambahan aset merupakan alat-alat fasilitas pelabuhan dan peralatan cabang Belawan yang digunakan kembali untuk kegiatan operasional yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap belum dimanfaatkan sebesar Rp1.452.640.000 dan sebesar Rp149.068.333 dan alat-alat fasilitas pelabuhan cabang Gunung Sitoli sebesar Rp196.900.000 yang sebelumnya dicatat sebagai aset tidak berfungsi. Pengurangan tanah cabang Kuala Tanjung sebesar Rp54.745.086 merupakan tanah yang disewakan kepada pihak lain dan dicatat sebagai properti investasi, serta pengurangan aset bangunan fasilitas pelabuhan, alat-alat fasilitas pelabuhan, jalan dan bangunan, kapal, instalasi fasilitas pelabuhan, dan peralatan sebesar Rp53.637.440.957 merupakan reklasifikasi aset tetap ke akun aset tidak berfungsi karena tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Bangunan fasilitas pelabuhan	291.211.025.069	394.756.847.061
Kapal	222.038.464.632	21.388.938.795
Alat fasilitas pelabuhan	323.470.096.449	267.796.279.575
Instalasi fasilitas pelabuhan	171.608.789.997	4.457.296.000
Jalan dan bangunan	248.609.789.108	112.684.249.427
Peralatan	26.941.039.613	-
Jumlah	1.283.879.204.868	801.083.610.858

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

13. Aset Tetap (lanjutan)

Perusahaan mereklasifikasi aset dalam penyelesaian sebagian besar ke aset tetap berdasarkan realisasi penyelesaian yang didukung dengan berita acara serah terima pekerjaan masing-masing sebesar Rp668.994.623.545 dan Rp440.479.678.306 untuk tahun 2017 dan 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian rata-rata berkisar antara 50% sampai dengan 95%.

Pada tahun 2017 terdapat realisasi penghapusan aset atas persetujuan penghapusbukuan aset Perusahaan sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S- 339/MBU/07/2016 tanggal 11 Juli 2016 dan Nomor S-566/MBU/09/2016 tanggal 29 September 2016 dan Surat Dewan Komisaris No.KU.61/038/DK/PP.II/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang tersebar pada akun aset sebagai berikut:

- Aset tetap sebesar harga perolehan Rp437.397.398 dan nilai buku Rp57.132.069.
- Aset tetap tidak produktif sebesar harga perolehan Rp8.350.519.091 dan nilai buku Rp1.236.800.716.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap.

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan utang bank (catatan 23)

14. Aset Tak Berwujud

Rincian aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

Uraian	2017			
	Saldo Awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Sertifikasi fasilitas dan sarana	-	814.434.917	-	814.434.917
Konsultan dan appraisal	298.470.000	257.900.000	-	556.370.000
Pendidikan fasilitas dan sarana	13.886.210.295	10.283.956.528	-	24.170.166.823
Pendidikan non fasilitas dan sarana	-	3.633.987.180	-	3.633.987.180
Lainnya	72.123.991.821	21.081.716.895	-	93.205.708.716
Aset dalam konstruksi	-	114.034.823.414	-	114.034.823.414
Sub Jumlah	86.308.672.116	150.106.818.934	-	236.415.491.050
Akumulasi amortisasi	5.856.848.034	27.783.438.884	-	33.640.286.918
Jumlah	80.451.824.082			202.775.204.132

Saldo aset tak berwujud lainnya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp93.205.708.716 dan Rp72.123.991.821, merupakan implementasi ERP-SAP dan *share service* unit (SSU).

15. Aset Tidak Lancar Lainnya

Rincian aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
<u>Aset Tetap Belum Dimanfaatkan</u>		
Tanah	805.851.797	789.609.797
Bangunan fasilitas pelabuhan	20.874.229.471	21.968.133.230
Jalan dan bangunan	86.276.000	16.242.000
Kapal	527.000.000	527.000.000
Alat-alat fasilitas pelabuhan	170.500.000	-
Kendaraan	634.024.224	634.024.224
Sub Jumlah Aset Tetap Belum Dimanfaatkan	23.097.881.492	23.935.009.251
<u>Aset Tetap Tidak Produktif</u>		
Aset tetap tidak produktif	121.984.241.440	81.681.521.007
Amortisasi aset tetap tidak produktif	(95.343.642.612)	(72.445.225.604)
Penurunan nilai aset tetap tidak produktif	(17.988.382.700)	-
Sub Jumlah Aset Tetap Tidak Produktif	8.652.216.128	9.236.295.403
Lainnya	9.208.648	9.208.648
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	31.759.306.268	33.180.513.302

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

15. Aset Tidak Lancar Lainnya (lanjutan)

Aset tetap tidak produktif merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Perusahaan, yang sebagian besar terdiri atas kapal dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti *Transtainer, Rubber Tire Gantry Crane, Forklift, Reach Steaker* dan *Harbour Mobile Crane*.

Saldo bangunan fasilitas pelabuhan merupakan bangunan pelabuhan di Tembilahan dan Tanjung Balai Asahan yang belum bisa dimanfaatkan karena akses jalan/jembatan menuju ke area tersebut belum tersedia. Manajemen berkeyakinan bahwa aset tetap yang belum dimanfaatkan masih berada dalam nilai wajar sehingga tidak perlu diturunkan nilainya.

16. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Rincian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Piutang lain-lain pihak ketiga	13.537.896.496	13.703.068.370
Uang jaminan	15.315.728.210	315.728.210
Sub Jumlah	28.853.624.706	14.018.796.580
Cadangan penyisihan piutang lain-lain	(13.089.438.566)	(12.312.620.702)
Jumlah Bersih	15.764.186.140	1.706.175.878

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp13.537.896.496 dan Rp13.703.068.370 merupakan piutang usaha tidak tertagih lebih dari 3 tahun dan telah dibentuk cadangan penyisihannya.

Saldo uang jaminan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Rp15.315.728.210 dan Rp315.728.210 sebagian besar merupakan deposito yang diagunkan untuk pengadaan *Reach Stacker* Rp15.000.000.000 pada anak perusahaan PT Prima Indonesia Logistik.

17. Utang Usaha

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Rupiah	1.432.120.277.093	1.055.250.734.085
Dolar Amerika Serikat	352.303.036	20.084.572.697
Jumlah	1.432.472.580.129	1.075.335.306.782

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
<u>Pihak Berelasi</u>		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	223.023.966.481	176.873.193.014
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	114.889.327.285	20.822.478.567
PT Hutama Karya (Persero)	111.258.602.136	91.430.336.409
PT Brantas Abipraya (Persero)	62.646.152.697	66.209.897.652
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	59.280.000.000	-
PT Nindya Karya (Persero)	26.571.870.119	30.560.811.595
PT Virama Karya (Persero)	7.316.575.500	8.730.375.500
Unit Galangan Kapal (UGK)	5.957.500.000	28.099.110.030
PT Pertamina (Persero)	3.873.297.343	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.281.306.150	7.281.447.301
DPC INSA Pekanbaru - Sei Pakning	1.144.818.097	-
PT Sucofindo (Persero)	5.015.220.731	2.039.489.481
PT Surveyor Indonesia (Persero)	1.660.583.520	3.447.901.956
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.648.580.616	-
PT Danareksa Sekuritas	-	2.119.000.000
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	-	1.837.367.281
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	3.988.294.358	21.723.915.222
Sub Jumlah Pihak Berelasi	631.556.095.033	461.175.324.008

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

17. Utang Usaha (lanjutan)

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Waruna Nusa Sentana	104.233.060.630	-
Terberg Tractors Malaysia SDN, BHD	77.870.630.000	25.125.000.000
Sennobogen Maschinenfabrik Gmbh	63.617.086.650	109.960.400.000
PT Citra Shipyard	63.319.461.473	-
Liebherr Werk Nenzing	50.242.243.307	91.272.950.000
PT Anta Raksa	33.651.905.042	7.792.749.162
PT Kaharutama	23.280.352.848	22.105.664.436
PT Wahana Adidaya Pertiwi	22.769.898.990	48.325.224.000
Konecranes Finland Corporation	22.110.000.000	-
Shanghai Zenhua Heavy Industri Co.	21.277.486.264	21.303.202.504
PT Harbarindo Baharitama	20.336.198.580	4.803.971.005
PT Pahala Harapan Lestari	18.022.817.500	-
PT Daya Radar Utama	14.687.118.000	10.127.270.105
PT Harijadi Sukses	14.003.513.956	19.129.406.272
PT Primus Indonesia	13.400.565.601	9.418.169.859
PT Konsulindo Informatika Perdana	11.230.556.172	13.866.433.438
PWC Consulting	11.210.781.209	6.074.380.182
PT Kuda Inti Samudera	9.964.214.149	-
PT Indo Traktor Utama	7.072.727.273	-
PT Mitra Persada Jaya	7.054.215.000	-
PT Bintang Seroja	6.269.515.455	-
PT Sena Sanjaya Makmur Sejahtera	5.985.360.000	5.985.360.000
PT Asha Portindo	5.645.070.613	1.681.974.496
PT Duta Utama Sumatera	5.396.250.000	-
PT Karya Utama Unggul	5.314.382.020	16.516.265.310
PT Karya Karimun Mandiri	4.330.352.329	5.695.694.364
PT Rajawali Sakti Prima	3.993.699.927	-
Premiere Risk Catalyst Consulting	3.923.238.168	-
PT Astra Isuzu Medan	3.840.909.090	-
PT Tisa Lestari	3.754.880.000	6.188.954.544
PT Emitraco Investama Mandiri	3.642.883.488	-
PT Energi Cakrawala Buana	5.489.114.907	-
PT Jasautama Sukmaperkasa	3.453.865.403	-
PT Dungo Reksa	3.297.640.364	-
Duta Agung Group	3.287.681.136	-
PT AKR Corporindo Tbk	3.059.008.989	-
PT Prima Teknik Husada	2.956.749.091	1.876.093.229
PT Budi Putra Indonesia	2.641.041.363	-
PT Multi Jaya Samudera	2.598.000.000	3.900.000.000
PT Batam Expresindo Shipyard	2.387.090.910	-
Havenbedrijf Rotterdam NV	2.207.315.000	-
Chairani	2.181.681.818	6.332.727.273
PT Lautan Belawan Jaya	2.102.052.706	-
PT Gambir Mas Pangkalan	2.013.861.336	1.482.395.577
PT Bramasari	2.008.181.818	10.886.769.091
PT Sidomukti Lestari	1.960.227.932	-
PT Aryaguna Jaya	1.833.371.051	3.904.370.348
PT Kawasan Industri Dumai	1.824.051.542	9.477.379.294
Cargotec CHS PTE LTD	1.822.412.902	-
Jumlah dipindahkan	708.574.722.002	463.232.804.489

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

17. Utang Usaha (lanjutan)

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Jumlah dipindahkan	708.574.722.002	463.232.804.489
PT Gada Jaya	1.741.611.421	-
PT Layar Dumai Sejahtera	1.559.219.271	1.254.393.048
CV Khoda Medan	1.552.956.347	1.364.545.455
PT Sinar Jaya Mandiri	1.518.841.409	-
PT Rasya Utama	1.416.854.310	2.429.648.545
PT Garda Parahiangan	1.384.207.510	-
PT Arkindo	1.287.516.773	9.012.617.409
PT Kurnia Samudra	1.250.938.424	1.355.668.637
PT Rantai Bahari Nusantara	1.228.092.789	-
Bonafindo Consultatnt	1.172.126.211	-
PT Aman Arwita Maritime	1.126.620.544	-
PT Abadi Tetap Jaya	1.101.674.545	-
PT Haskoning Indonesia	1.100.261.317	2.902.647.353
Koperasi UTPK Belawan	1.083.794.492	6.494.793.288
PT Adhimascipta Dwipantara	1.079.397.289	-
Sumatera Computer Centre	1.074.562.000	2.097.539.620
PT Mandiri Teknik Utama Sejahtera	1.069.347.400	-
CV Bina Tekhnik	1.068.181.818	-
Andi Hakim	-	9.297.402.182
PT Aneka Kimia Raya Corporindo	-	5.808.564.372
PT Musim Mas	-	4.997.924.339
PT Lemo TM	-	4.477.713.052
Kemenangan	-	3.638.129.000
PT Maha Karya Geo Survey	-	3.549.276.000
Pelayaran Multi Jaya Samudera	-	3.304.800.000
Tiga Lestari	-	2.927.960.000
DPC Insa	-	2.830.018.825
PT Inti Persada Raya Lestari	-	2.763.996.860
CV Trijaya Anugrah Lestari	-	2.266.000.000
PT Bina Pemuda	-	2.196.460.000
CV Mitra Sukses	-	2.025.691.130
PT Tirta Nusa Persada	-	1.851.051.221
Mandiri Teknik Utama Sejahtera	-	1.830.441.600
Jet Marine Supplier	-	1.820.240.909
PT Sinar Jaya Mandiri	-	1.803.903.636
PT Abadi Tetap Jaya	-	1.643.554.273
PT Meito Indonesia	-	1.609.764.856
Roland Berger Strategy Consultans	-	1.530.191.600
PT Adei Plantation & Industry	-	1.435.000.000
Putra Rahyan Gemilang	-	1.387.990.450
PT Synergy Engineering	-	1.325.025.000
PT Indoterminal Belawan Perkasa	-	1.214.221.801
Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI	-	1.211.450.328
CV Putera Gemilang	-	1.035.142.836
PT Hamparan Alam Baruna Indonesia	-	1.028.917.000
PT Wisaka Tidar Jaya	-	1.020.823.975
PT Dwisaka Mas Indah	-	2.213.245.100
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	69.525.559.224	49.970.424.585
Jumlah Pihak Ketiga	800.916.485.096	614.159.982.774
Jumlah Utang Usaha	1.432.472.580.129	1.075.335.306.782

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

17. Utang Usaha (lanjutan)

Utang usaha pihak berelasi kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp223.023.966.481 (Catatan 40), merupakan pekerjaan penataan terminal multipurpose pelabuhan Belawan yang meliputi: pekerjaan perpanjangan dermaga IKD 150x25M, Proteksi *Sheet Pile*, Perkuatan Dermaga *Ferry*, Pembangunan Gudang Curah, Pembangunan *Conveyor Belt*, *Breasthing Dolphin* dan Pembangunan Kantor Kepanduan, dengan periode kontrak pekerjaan sampai dengan tahun 2017.

Utang usaha pihak berelasi kepada PT Utama Karya (Persero) pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp111.258.602.136 (Catatan 40) merupakan pekerjaan pengembangan *dedicated* terminal pelabuhan Belawan yang meliputi: pembangunan *car terminal* di Belawan lama dan penyiapan instalasi CPO antar pulau di pelabuhan Belawan yaitu: pembangunan tangki timbun, instalasi pipa dan pompa, akses jalan masuk, perbaikan dermaga, pembuatan daprah dan *mooring dolphin* untuk CPO antar pulau.

Utang usaha pihak berelasi kepada PT Brantas Abipraya (Persero) pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp62.646.152.697 merupakan hutang atas pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan sungai dumai (progress 18,489%).

Tidak ada utang usaha yang dijamin.

18. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Pegawai	105.846.004.559	98.838.565.963
Umum	28.164.990.820	34.130.778.507
Asuransi	15.748.801	2.115.340.759
Bahan	6.748.978.834	22.860.885.868
Sewa	4.476.366.154	12.761.060.152
Pemeliharaan	1.190.724.113	5.808.498.142
Administrasi kantor	1.499.981.346	2.380.781.888
Biaya di luar usaha	-	1.665.749.208
Kerja sama Mitra	3.598.085.411	10.873.979.923
Lainnya	14.839.349.865	17.567.220.253
Jumlah	166.380.229.903	209.002.860.663

Biaya lainnya tahun 2017 dan 2016, antara lain merupakan *fee* konsesi atas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2015

19. Bagian Lancar Pendapatan Diterima Dimuka/Deposit/Uang Jaminan

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Uang panjar	31.021.746.446	15.336.496.062
Uang titipan	22.947.828.402	20.027.441.438
Pendapatan sewa diterima dimuka jangka pendek	56.906.961.745	31.427.777.357
Jumlah	110.876.536.593	66.791.714.857

Uang muka pelanggan merupakan pendapatan diterima dimuka sebelum pelayanan jasa kepelabuhanan diberikan kepada pelanggan.

Uang titipan pada tahun 2017 sebagian besar merupakan *reimbursement* PPh pasal 23 dan iuran peserta taspen, pensiun, koperasi, serikat pekerja.

Uang titipan pada tahun 2016 terdiri dari klaim asuransi sebesar Rp1.725.436.452, serta iuran peserta taspen, pensiun, koperasi, serikat pekerja, dan lainnya sebesar Rp18.302.004.986.

20. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Utang PNBP	873.165.919	-
Lainnya	909.795.820	-
	1.782.961.739	-

Utang PNBP bersumber dari jasa pelayanan kapal dan pelayanan barang sesuai dengan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016. Utang jangka pendek lainnya tahun 2017 bersumber dari iuran BPJS, Asuransi, dan uang titipan lainnya.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

21. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Utang lain-lain pihak berelasi	-	77.500.000.000
Lainnya	93.105.289	1.000.000
Jumlah	93.105.289	77.501.000.000

Utang lain-lain pihak berelasi di tahun 2016 merupakan utang penyertaan atas penambahan modal pada entitas pengendalian bersama PT Prima Terminal Petikemas.

22. Perpajakan

a. Pajak dibayar dimuka

	31-Des-17	31-Des-16
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Penghasilan Pasal 23	93.141.124	-
Sub Jumlah Perusahaan	93.141.124	-
<u>Entitas Anak</u>		
PPN masukan	49.588.430	-
Sub Jumlah Entitas Anak	49.588.430	-
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	142.729.554	-

b. Utang Pajak

	31-Des-17	31-Des-16
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Pertambahan Nilai	167.788.639	6.171.492.176
Pajak Penghasilan Pasal 21	6.988.531.729	-
Pajak Penghasilan Pasal 22	383.101.782	-
Pajak Penghasilan Pasal 23	890.836.198	-
Pajak Penghasilan Pasal 25	16.858.997.730	15.613.245.566
Pajak Penghasilan Pasal 29	16.149.137.052	23.388.288
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	3.447.767.460	-
Pajak lainnya	-	11.792.510.009
Sub Jumlah Perusahaan	44.886.160.590	33.600.636.039
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Pertambahan Nilai	378.369.077	468.893.830
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.167.107.324	127.554.909
Pajak Penghasilan Pasal 23	74.945.110	43.752.685
Pajak Penghasilan Pasal 29	1.540.837.807	1.711.411.204
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	30.122.727	-
Pajak lainnya	-	3.629.032
Sub Jumlah Entitas Anak	3.191.382.045	2.355.241.660
Jumlah Utang Pajak	48.077.542.635	35.955.877.699

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

22. Perpajakan (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Perusahaan</u>		
Pajak kini	(253.790.009.250)	(207.215.851.250)
Pajak tangguhan	(4.690.686.890)	(53.276.640.257)
Sub Jumlah Perusahaan	(258.480.696.140)	(260.492.491.507)
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak kini	(5.155.326.264)	(3.548.738.909)
Pajak tangguhan	1.379.567.393	1.497.322.776
Sub Jumlah Entitas Anak	(3.775.758.871)	(2.051.416.133)
<u>Konsolidasian</u>		
Pajak kini	(258.945.335.514)	(210.764.590.159)
Pajak tangguhan	(3.311.119.496)	(51.779.317.481)
Jumlah Konsolidasian	(262.256.455.010)	(262.543.907.640)

Pajak Kini

Perhitungan rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba sebelum pajak penghasilan	1.073.424.193.944	995.846.364.750
Dikurangi:		
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(38.736.027.210)	(11.639.931.083)
Penyesuaian eliminasi konsolidasi	(3.321.938.940)	(2.335.831.300)
	1.031.366.227.794	981.870.602.367
Beda temporer:		
Beban manfaat karyawan bersih	24.904.891.570	(61.781.639.793)
Penyisihan piutang usaha	7.612.157.277	(1.117.493.744)
Beban amortisasi	173.067.817	4.521.919.113
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi	(51.395.150.751)	(55.982.875.873)
	(18.705.034.087)	(114.360.090.297)
Beda tetap		
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	130.888.903.836	87.274.234.713
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(128.390.059.605)	(125.921.341.307)
	2.498.844.231	(38.647.106.594)
Taksiran penghasilan kena pajak	1.015.160.037.938	828.863.405.476
Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan	1.015.160.037.000	828.863.405.000
Tarif pajak	25%	25%
Beban pajak kini	253.790.009.250	207.215.851.250
Kredit pajak		
PPh Pasal 22	(8.155.918.150)	-
PPh Pasal 23	(31.940.981.288)	(23.807.909.822)
PPh Pasal 25	(197.543.972.760)	(183.384.553.140)
Jumlah Kredit Pajak	(237.640.872.198)	(207.192.462.962)
Pajak Penghasilan Badan Kurang (Lebih) Bayar	16.149.137.052	23.388.288

Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah suatu perhitungan yang dibuat untuk tujuan akuntansi pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

22. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penghasilan yang dibebankan/(dikreditkan) sehubungan dengan penghasilan komprehensif lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban Imbalan Kerja yang diakui di laporan ekuitas - Program DP4	10.662.438.824	5.722.823.144
Beban/(Pendapatan) Imbalan Kerja yang diakui di laporan ekuitas - PPUKP	5.670.761.998	3.857.437.823
(Pendapatan)/Beban Pajak	<u>(4.083.300.205)</u>	<u>(2.395.065.243)</u>
Beban/(Pendapatan) Imbalan Kerja yang diakui di laporan ekuitas	<u>12.249.900.617</u>	<u>7.185.195.724</u>

d. Pajak Tangguhan

Saldo dan mutasi pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

2017				
Komponen		Dikreditkan ke	Dikreditkan ke	
Pajak Tangguhan	Saldo Awal	Laba (Rugi)	Ekuitas	Saldo Akhir
<u>Perusahaan</u>				
Aset tetap dan properti investasi	(96.126.346.736)	(12.848.787.688)	-	(108.975.134.424)
Beban amortisasi	360.428.528	43.266.954	-	403.695.482
Imbalan kerja	38.412.487.757	6.226.222.893	4.083.300.205	48.722.010.855
Cadangan piutang	6.515.735.066	1.903.039.319	-	8.418.774.385
Beban lainnya	<u>14.428.368</u>	<u>(14.428.368)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Sub Jumlah	<u>(50.823.267.017)</u>	<u>(4.690.686.890)</u>	<u>4.083.300.205</u>	<u>(51.430.653.702)</u>
<u>Entitas Anak</u>				
Kerugian fiskal yang belum digunakan	<u>1.501.865.058</u>	<u>1.379.567.394</u>	<u>-</u>	<u>2.881.432.452</u>
Sub Jumlah	<u>1.501.865.058</u>	<u>1.379.567.394</u>	<u>-</u>	<u>2.881.432.452</u>
	<u>(49.321.401.959)</u>	<u>(3.311.119.496)</u>	<u>4.083.300.205</u>	<u>(48.549.221.250)</u>
2016				
Komponen		Dikreditkan ke	Dikreditkan ke	
Pajak Tangguhan	Saldo Awal	Laba (Rugi)	Ekuitas	Saldo Akhir
Aset tetap dan properti investasi	(64.127.125.081)	(31.999.221.656)	-	(96.126.346.737)
Beban ditangguhkan	6.471.810.617	(6.111.382.089)	-	360.428.528
Imbalan kerja	51.462.832.464	(15.445.409.948)	2.395.065.242	38.412.487.758
Cadangan piutang	6.236.361.630	279.373.436	-	6.515.735.066
Beban lainnya	14.428.368	-	-	14.428.368
Kerugian fiskal yang belum digunakan	<u>4.542.282</u>	<u>1.497.322.776</u>	<u>-</u>	<u>1.501.865.058</u>
Sub Jumlah	<u>62.850.280</u>	<u>(51.779.317.481)</u>	<u>2.395.065.242</u>	<u>(49.321.401.959)</u>

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset yang direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

22. Perpajakan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara jumlah beban/(penghasilan) pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Laba sebelum taksiran pejak penghasilan	1.073.424.193.944	995.846.364.750
Pajak penghasilan dengan tarif yang berlaku	268.356.048.486	248.961.591.188
Dampak pajak penghasilan pada:		
Laba setelah pajak entitas asosiasi	(5.682.471.743)	(2.397.128.738)
Efek pajak dari beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	32.722.225.959	48.509.154.663
Pemanfaatan imbalan kerja	(1.056.260.923)	(1.049.374.146)
Penghasilan kena pajak final	(32.097.514.901)	(31.480.335.327)
Koreksi saldo tahun lalu	14.428.368	-
Jumlah	262.256.455.010	262.543.907.640

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pada tahun 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk masa pajak 2013 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut:

No	Tahun Pajak	Objek Pajak	Cabang	Nomor Surat	Jumlah Kurang Bayar
1	2013	PPN	Pusat	00012/287/13/093/17	58.432.559
2	2013	PPN	Pusat	00013/287/13/093/17	809.560
3	2013	PPN	Pusat	00014/287/13/093/17	7.576.524
4	2013	PPN	Pusat	00015/287/13/093/17	9.097.732
5	2013	PPN	Pusat	00016/287/13/093/17	26.240.400
6	2013	PPN	Pusat	00017/287/13/093/17	23.580.544
7	2013	PPN	Pusat	00018/287/13/093/17	4.460.569
8	2013	PPN	Pusat	00104/207/13/093/17	1.463.636
9	2013	PPN	Pusat	00105/207/13/093/17	849.150
10	2013	PPN	Pusat	00106/207/13/093/17	1.672.890
11	2013	PPN	Pusat	00107/207/13/093/17	4.286.092
12	2013	PPN	Pusat	00108/207/13/093/17	168.625.210
13	2013	PPN	Pusat	00109/207/13/093/17	30.215.200
14	2013	PPN	Pusat	00110/207/13/093/17	98.139.270
15	2013	PPN	Pusat	00111/207/13/093/17	157.569.666
16	2013	PPN	Pusat	00112/207/13/093/17	409.659.385
17	2013	PPN	Pusat	00113/207/13/093/17	554.328.248
18	2013	PPN	Pusat	00114/207/13/093/17	84.947.688
19	2014	PPN	Pusat	00068/207/14/093/17	159.571.434
20	2014	PPN	Pusat	00069/207/14/093/17	133.937.607
21	2014	PPN	Pusat	00070/207/14/093/17	86.926.625
22	2014	PPN	Pusat	00071/207/14/093/17	87.671.170
23	2014	PPN	Pusat	00072/207/14/093/17	61.027.784
24	2014	PPN	Pusat	00073/207/14/093/17	41.533.268
25	2014	PPN	Pusat	00074/207/14/093/17	59.423.807
26	2014	PPN	Pusat	00075/207/14/093/17	357.811.238
27	2014	PPN	Pusat	00076/207/14/093/17	79.091.915
28	2014	PPN	Pusat	00077/207/14/093/17	58.007.900
29	2014	PPN	Pusat	00078/207/14/093/17	129.430.958
30	2014	PPN	Pusat	00079/207/14/093/17	78.915.952
31	2013	PPh badan	Pusat	00011/206/13/093/17	10.543.250.640
32	2014	PPh badan	Pusat	00007/206/14/093/17	4.065.051.990
33	2013	PPh pasal 21	DPKB	00094/101/13/112/17	111.980
Jumlah dipindahkan					17.583.718.591

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

22. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (lanjutan)

Pada tahun 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk masa pajak 2013 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut:

No	Tahun Pajak	Objek Pajak	Cabang	Nomor Surat	Jumlah Kurang Bayar
Jumlah pindahan					17.583.718.591
34	2013	PPh pasal 21	DPKB	00093/101/13/112/17	157.663
35	2013	PPh pasal 21	DPKB	00092/101/13/112/17	100.000
36	2014	PPh pasal 21	DPKB	00116/101/14/112/17	100.000
37	2014	PPh pasal 21	DPKB	00114/101/14/112/17	161.647
38	2014	PPh pasal 21	DPKB	00115/101/14/112/17	100.000
39	2013	PPh pasal 21	RSPM	00091/101/13/112/17	213.260
40	2013	PPh pasal 21	RSPM	00090/101/13/112/17	100.000
41	2014	PPh pasal 21	RSPM	00113/101/14/112/17	100.000
42	2013	PPh pasal 21	Batam	00036/101/13/215/17	100.000
43	2013	PPh pasal 21	Batam	00001/201/13/215/17	88.880.576
44	2013	PPh pasal 21	Batam	00035/101/13/215/17	300.000
45	2014	PPh pasal 21	Batam	00064/101/14/215/17	266.778
46	2014	PPh pasal 21	Batam	00001/201/14/215/17	37.414.326
47	2013	PPh pasal 21	TBK	00001/201/13/223/17	63.863.920
48	2014	PPh pasal 21	TBK	00001/201/14/223/17	45.130.237
49	2014	PPh pasal 21	TBK	00008/101/13/223/17	197.794
50	2013	PPh pasal 21	Pekanbaru	00003/201/13/218/17	49.452.004
51	2014	PPh pasal 21	Pekanbaru	00003/201/14/218/17	143.053.837
52	2014	PPh pasal 21	SBG	00015/101/14/126/17	400.000
53	2014	PPh pasal 21	SBG	00002/201/14/126/17	7.161.412
54	2014	PPh pasal 23	DPKB	00014/103/14/112/17	53.866
55	2014	PPh pasal 23	DPKB	00015/103/14/112/17	100.000
56	2013	PPh pasal 23	DPKB	00011/103/13/112/17	51.326
57	2013	PPh pasal 23	DPKB	00010/103/13/112/17	83.007
58	2013	PPh pasal 23	DPKB	00009/103/13/112/17	100.000
59	2013	PPh pasal 23	RSPM	00008/103/13/112/17	122.120
60	2014	PPh pasal 23	RSPM	00011/103/14/112/17	44.492
61	2014	PPh pasal 23	RSPM	00010/103/14/112/17	9.045
62	2014	PPh pasal 23	TPKDB	00012/103/14/112/17	100.000
63	2013	PPh pasal 23	Batam	00001/103/13/215/17	100.000
64	2013	PPh pasal 23	Batam	00001/203/13/215/17	11.288.676
65	2014	PPh pasal 23	Batam	00001/203/14/215/17	56.076.410
66	2013	PPh pasal 23	TBK	00001/203/13/223/17	447.872.451
67	2014	PPh pasal 23	TBK	00001/203/14/223/17	305.334.691
68	2013	PPh pasal 23	Pekanbaru	00014/203/13/218/17	3.936.440
69	2014	PPh pasal 23	Pekanbaru	00003/203/14/218/17	87.958.135
70	2014	PPh pasal 23	SBG	00002/103/14/126/17	200.000
71	2014	PPh pasal 23	SBG	00002/203/14/126/17	497.832
72	2014	PPh pasal 23	SBG	00003/203/14/126/17	583.019
73	2014	PPh pasal 23	SBG	00004/203/14/126/17	1.071.418
74	2014	PPh pasal 23	SBG	00005/203/14/126/17	2.045.412
75	2014	PPh pasal 23	SBG	00006/203/14/126/17	1.019.609
76	2014	PPh pasal 23	SBG	00007/203/14/126/17	1.020.083
77	2014	PPh pasal 23	SBG	00008/203/14/126/17	1.161.970
78	2014	PPh pasal 23	SBG	00009/203/14/126/17	1.195.133
79	2014	PPh pasal 23	SBG	00010/203/14/126/17	1.017.019
Jumlah dipindahkan					18.944.014.199

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

22. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (lanjutan)

Pada tahun 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk masa pajak 2013 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut:

No	Tahun Pajak	Objek Pajak	Cabang	Nomor Surat	Jumlah Kurang Bayar
Jumlah pindahan					18.944.014.199
80	2014	PPh pasal 23	SBG	00011/203/14/126/17	2.559.750
81	2014	PPh pasal 23	SBG	00012/203/14/126/17	4.730.460
82	2014	PPh pasal 23	SBG	00013/203/14/126/17	364.017
83	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00002/140/13/215/17	100.000
84	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00003/140/13/215/17	100.000
85	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00001/240/13/215/17	1.776.000
86	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00002/240/13/215/17	5.476.000
87	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00010/140/14/215/17	100.000
88	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00011/140/14/215/17	100.000
89	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00002/240/14/215/17	1.776.000
90	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00012/140/14/215/17	100.000
91	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00013/140/14/215/17	100.000
92	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00014/140/14/215/17	100.000
93	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00003/240/14/215/17	7.104.000
94	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00004/240/14/215/17	5.476.000
95	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00005/240/14/215/17	1.776.000
96	2014	PPh pasal 4 ayat 2	Batam	00006/20/14/215/17	3.552.000
97	2013	PPh pasal 4 ayat 2	Pekanbaru	00002/240/13/218/17	8.894.402
98	2014	PPh pasal 4 ayat 2	SBG	00002/140/14/126/17	100.000
99	2013	PPh pasal 15	Batam	00001/141/13/215/17	100.000
100	2013	PPh pasal 15	Batam	00001/241/13/215/17	5.542.088
101	2014	PPh pasal 15	Batam	00001/141/14/215/17	100.000
102	2014	PPh pasal 15	Batam	00002/141/14/215/17	100.000
103	2014	PPh pasal 15	Batam	00001/241/14/215/17	11.632.914
104	2013	PPh pasal 15	TBK	00001/141/13/223/17	3.379.364
105	2014	PPh pasal 15	TBK	00001/141/14/223/17	565.069
Jumlah					19.009.718.263

Pajak kurang bayar tersebut di atas seluruhnya telah dibayar Perusahaan pada tahun 2017.

f. Administrasi Perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

23. Utang Bank

Akun ini terdiri dari:

	31-Des-17	31-Des-16
Utang bank jangka pendek	10.571.780.774	-
Utang bank jangka panjang	327.000.000.000	52.883.016.545
Bagian lancar liabilitas jangka panjang	52.883.016.545	47.000.000.000
Jumlah Utang Bank	390.454.797.319	99.883.016.545

a. Utang bank jangka pendek

Rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Entitas Anak		
Pihak berelasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.571.780.774	-
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	10.571.780.774	-

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

23. Utang Bank (lanjutan)

b. Bagian lancar liabilitas jangka panjang

Rincian bagian lancar liabilitas jangka panjang adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Perusahaan		
Pihak berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.299.959.981	22.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47.583.056.564	25.000.000.000
Jumlah Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang	52.883.016.545	47.000.000.000

c. Utang bank jangka panjang

	31-Des-17	31-Des-16
Perusahaan		
Pihak berelasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	109.000.000.000	-
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Sub Jumlah	109.000.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	114.299.959.981	27.299.959.981
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.299.959.981)	(22.000.000.000)
Sub Jumlah	109.000.000.000	5.299.959.981
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	156.583.056.564	72.583.056.564
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(47.583.056.564)	(25.000.000.000)
Sub Jumlah	109.000.000.000	47.583.056.564
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	327.000.000.000	52.883.016.545

Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 25 Agustus 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dalam bentuk kredit R/C dan *Credit Overeenkomst* (OC) dengan plafon sebesar Rp400.000.000.000. Kredit investasi tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan bangunan fasilitas pelabuhan, kapal dan alat-alat fasilitas pelabuhan. Jangka waktu kredit selama tujuh tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian kredit, termasuk *grace period* selama dua belas bulan. Perjanjian kredit ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2018. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit ini adalah 9,5% p.a.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- Empat unit Kapal Tunda 2 x 1.600 HP yang terletak di Pelabuhan Belawan dan Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp160.781.000.000.
- Dua unit kapal pandu cepat yang terletak di Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp35.000.000.000.
- Dua unit *Wheel Loader* yang terletak di Belawan dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp5.000.000.000.
- Satu unit truk tangki bahan bakar minyak (BBM) yang terletak di Belawan *International Container Terminal* dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp499.000.000.
- Satu unit *forklift* yang terletak di Unit Galangan Kapal Belawan kapasitas 2,5 ton dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp405.000.000.
- Satu unit *mobile generator set* kapasitas 1.250 KVA yang terletak di Belawan *International Container Terminal* dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp8.000.000.000.
- Satu unit *mobile crane* kapasitas 60 ton yang terletak di Tanjung Pinang dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp7.585.000.000.
- Dermaga dengan panjang 100 m (meter) di Belawan *International Container Terminal* (BICT) dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp42.625.000.000.
- Dua unit gudang seluas 4.000 m (meter) di Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp19.982.000.000.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

23. Utang Bank (lanjutan)

- Perpanjangan Dermaga B sepanjang 400 m (meter) di Pelabuhan Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp143.566.000.000.
- Gedung *workshop* seluas 640 m yang berlokasi di Belawan *Logistic Centre* dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp2.310.000.000.
- Satu unit *generator set* kapasitas 2.725 KVA, trafo dan instalasi yang berlokasi di pelabuhan Belawan dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp12.000.000.000.
- Satu unit *generator set* kapasitas 1.825 KVA yang berlokasi di Belawan *International Container Terminal* dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp15.000.000.000.
- Satu unit *mobile generator set* yang terletak di Pelabuhan Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp8.000.000.000.
- *Conveyor System* Terminal Curah yang terletak di Pelabuhan Dumai dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp39.483.000.000.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari bank, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan: meminta untuk dinyatakan pailit, mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau keseluruhan atas hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit, mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, memperoleh kredit/fasilitas baru dari bank/lembaga keuangan/pihak ketiga lainnya kecuali *debt to equity ratio* maksimal sebesar 210% masih terpenuhi (Perusahaan cukup dengan memberikan surat pemberitahuan), menyewakan aset-aset yang menjadi jaminan fasilitas kredit kepada pihak ketiga (kecuali untuk operasional usaha).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 5 April 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dengan limit sebesar Rp126.000.000.000. Selain fasilitas kredit investasi, Perusahaan juga mendapatkan fasilitas kredit *Non Cash Loan* berupa *Letter of Credit (L/C)* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dengan limit sebesar Rp126.000.000.000. Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan. Jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit ini adalah 9,5% p.a.

Jaminan atas fasilitas kredit adalah seluruh alat-alat fasilitas pelabuhan yang perolehannya dibiayai dengan menggunakan fasilitas kredit ini dengan nilai penjaminan sebesar Rp126.500.000.000.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari Bank, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan: menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan yang telah ditentukan, memperoleh pinjaman baru dalam bentuk apapun dari bank atau kreditur lainnya, memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada *group* usaha Perusahaan kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Perusahaan, mengikat diri sebagai penanggung/penjamin utang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain, memindahtangankan agunan kecuali menurut sifatnya dapat dipindahtangankan (tagihan, barang dagangan) dengan ketentuan Perusahaan harus mengganti agunan tersebut dengan barang yang sejenis dan/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani dengan jaminan, menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepas sebagian atau seluruh harta kekayaan Perusahaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perusahaan kepada bank, meminta untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang, melakukan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasi, diluar praktek-praktek kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih rendah daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.

Rasio keuangan yang wajib dijaga oleh Perusahaan adalah *leverage ratio* maksimal 250%, *current ratio* minimal 110% dan *debt service coverage ratio* minimal 110%. Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

23. Utang Bank (lanjutan)

Kredit Sindikasi Bank Mandiri, BNI dan BRI

Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 28 tanggal 21 Desember 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dengan limit sebesar Rp1.050.000.000.000. Proporsi masing-masing kreditur sindikasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp350.000.000.000, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp350.000.000.000 dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp350.000.000.000. Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *Capital Expenditur* Perusahaan di tahun 2017 dan 2018. Jangka waktu kredit adalah tujuh tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit, termasuk *grace period* selama satu tahun, perjanjian ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2017. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit ini adalah sebesar tingkat *Weighted Average Time Deposit* 3 bulan ditambah margin sebesar 3%.

Selama masih menerima fasilitas kredit dari bank, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan: melakukan perubahan bidang usaha yang dapat menimbulkan akibat yang material (kecuali dipersyaratkan oleh Perundang-undangan yang berlaku), melakukan *merger* atau konsolidasi dengan perusahaan lain (kecuali dipersyaratkan oleh Perundang-undangan yang berlaku), melakukan perubahan bentuk badan hukum, mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau keseluruhan atas hak dan kewajiban yang timbul dari pemberian fasilitas kredit, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan termasuk entitas anak kepada pihak lain, mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban utang kepada instansi yang berwenang, memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau kreditur lain, kecuali pinjam meminjam dalam rangka transaksi usaha yang wajar atau dalam hal setelah memperoleh fasilitas kredit rasio keuangan yang dipersyaratkan masih terpenuhi, maka Perusahaan cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bank Sindikasi melalui agen selambatnya lima hari sejak memperoleh fasilitas kredit/pinjaman tersebut.

Rasio keuangan yang wajib dijaga oleh Perusahaan adalah *current ratio* lebih besar atau sama dengan 1,1 kali, *debt service coverage ratio* lebih besar atau sama dengan 1,25 kali, dan *debt to equity ratio* lebih kecil atau sama dengan 2,1 kali. Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan.

Entitas Anak

PT Bank Negara Indonesia (Perero) Tbk

Sesuai dengan Perjanjian Kredit No: 003/MDC/PK-C3/2017 tanggal 18 Januari 2017, Entitas Anak (PT Prima Indonesia Logistik) memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk R/C terbatas dengan plafon sebesar Rp12.000.000.000. Kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja. Jangka waktu kredit sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2018. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas kredit ini adalah 8,5% p.a.

Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Bilyet Deposito No. Seri PAB 0427601 a.n PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp2.000.000.000.
- Bilyet Deposito No. Seri PAB 0427607 a.n PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp2.000.000.000.
- Bilyet Deposito No. Seri PAB 0427610 a.n PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp7.000.000.000.
- Bilyet Deposito No. Seri PAB 0491217 a.n PT Prima Indonesia Logistik sebesar Rp4.000.000.000.

Tidak ada *financial covenant* ataupun *negative covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

24. Utang Obligasi

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Nilai Nominal		
Utang pokok obligasi	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(3.398.782.545)	(4.229.264.301)
Sub Jumlah	996.601.217.455	995.770.735.699
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Jumlah Utang Obligasi	996.601.217.455	995.770.735.699

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

24. Utang Obligasi (lanjutan)

Rincian obligasi per seri adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Seri A		
Utang pokok obligasi seri A	50.000.000.000	50.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(116.112.699)	(193.521.060)
Sub Jumlah	<u>49.883.887.301</u>	<u>49.806.478.940</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Jumlah Obligasi Seri A	<u>49.883.887.301</u>	<u>49.806.478.940</u>
Seri B		
Utang pokok obligasi seri B	500.000.000.000	500.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(1.625.576.820)	(2.090.027.403)
Sub Jumlah	<u>498.374.423.180</u>	<u>497.909.972.597</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Jumlah Obligasi Seri B	<u>498.374.423.180</u>	<u>497.909.972.597</u>
Seri C		
Utang pokok obligasi seri C	400.000.000.000	400.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(1.459.701.606)	(1.725.101.898)
Sub Jumlah	<u>398.540.298.394</u>	<u>398.274.898.102</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Jumlah Obligasi Seri C	<u>398.540.298.394</u>	<u>398.274.898.102</u>
Seri D		
Utang pokok obligasi seri D	50.000.000.000	50.000.000.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(197.391.420)	(220.613.940)
Sub Jumlah	<u>49.802.608.580</u>	<u>49.779.386.060</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Jumlah Obligasi Seri D	<u>49.802.608.580</u>	<u>49.779.386.060</u>
Jumlah Utang Obligasi	<u>996.601.217.455</u>	<u>995.770.735.699</u>

Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016

Pada tanggal 21 Juni 2016 Perusahaan telah menawarkan kepada masyarakat Obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000 yang terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu:

- Obligasi Seri A sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat bunga 8,25% per tahun, jangka waktu 3 tahun.
- Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga 9% per tahun, jangka waktu 5 tahun.
- Obligasi Seri C sebesar Rp400.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,25% per tahun, jangka waktu 7 tahun.
- Obligasi Seri D sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,5% per tahun, jangka waktu 10 tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan.

Berdasarkan pemeringkatan terakhir dari Pefindo pada tanggal 10 Maret 2017 untuk periode 10 Maret 2017 sampai dengan 1 Maret 2018, Perusahaan memperoleh peringkat "idAA", yang artinya Perusahaan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut.

Obligasi ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Wali amanat dari obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Dalam perjanjian perwalianamanatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 70% dari total ekuitas Perusahaan.
- Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia, selaku pemegang saham Perusahaan.
- Mengurangi modal dasar dan modal disetor.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

24. Utang Obligasi (lanjutan)

- Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarinya Perusahaan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.
- Melakukan penjualan atau pengalihan aset, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali penjualan atau pengalihan aset yang merupakan kegiatan usaha utama Perusahaan, penjualan dan pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan penggantian atau pembaharuan aset yang telah usang karena pemakaian.
- Melakukan transaksi dengan pihak afiliasi (tidak termasuk perusahaan afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perusahaan atau setidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perusahaan dari pihak ketiga.
- Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham kepada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perusahaan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perusahaan

Realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

- Sebesar Rp540.000.000.000 digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
- Sebesar Rp420.000.000.000 digunakan untuk pengadaan peralatan.
- Sebesar Rp20.000.000.000 digunakan untuk kegiatan bina usaha.
- Sebesar Rp20.000.000.000 digunakan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi.

25. Imbalan Kerja

Rincian imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Liabilitas imbalan kerja - Program DP4	14.581.553.626	5.742.384.940
Liabilitas imbalan kerja - PPUKP	180.306.489.791	147.907.566.085
Jumlah	194.888.043.417	153.649.951.025

Beban imbalan kerja:

	2017	2016
Beban imbalan kerja - Program DP4	1.587.059.055	1.675.146.691
(Pendapatan)/Beban imbalan kerja - PPUKP	27.542.876.208	(59.259.289.899)
Jumlah	29.129.935.263	(57.584.143.208)

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. KEP-248/KM.6/2002 tanggal 21 Oktober 2002. DP4 merupakan dana pensiun yang didirikan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan mitra pendiri dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan PT Pengerukan Indonesia (Persero).

Perhitungan beban pensiun dan aset manfaat dana pensiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 menggunakan angka yang dihitung oleh Aktuaris PT Bestama Aktuaria melalui laporannya dengan Nomor: 17003/PEL-1/EP/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Nomor: 16017/PEL-1/EP/01/2017 tanggal 5 Januari 2017.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal tahun	178.784.182.718	183.320.055.766
Biaya bunga	13.462.696.732	15.546.311.759
Biaya jasa kini	1.710.650.343	2.287.619.103
Pembayaran imbalan kerja	(22.711.597.479)	(22.298.705.914)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial - asumsi	2.737.101.154	(4.634.878.370)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial - kewajiban	5.514.619.350	4.563.780.374
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir tahun	179.497.652.818	178.784.182.718

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

25. Imbalan Kerja (lanjutan)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Aset program awal periode	173.041.797.778	192.188.493.093
Hasil pengembangan riil	10.680.382.268	883.113.605
Pembayaran iuran - pemberi kerja	3.410.329.193	1.655.584.895
Pembayaran iuran - peserta program	495.187.432	613.312.099
Pembayaran imbalan kerja	(22.711.597.479)	(22.298.705.914)
Aset program akhir periode - aktual	164.916.099.192	173.041.797.778

Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan:

	2017	2016
Penentuan defisit/(surplus)		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir periode	179.497.652.818	178.784.182.718
Aset program akhir periode - aktual	(164.916.099.192)	(173.041.797.778)
Defisit/(surplus)	14.581.553.626	5.742.384.940

Liabilitas Imbalan Kerja

	2017	2016
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	179.497.652.818	178.784.182.718
Nilai wajar aset program	(164.916.099.192)	(173.041.797.778)
Defisit/(surplus) program yang didanai	14.581.553.626	5.742.384.940
Batas atas aset	-	-
Liabilitas/(aset)	14.581.553.626	5.742.384.940

Beban yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Biaya jasa kini	1.710.650.343	2.287.619.103
Beban bunga neto	371.596.144	839.687
Iuran peserta	(495.187.432)	(613.312.099)
Jumlah	1.587.059.055	1.675.146.691

Perubahan liabilitas bersih adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Liabilitas bersih awal tahun	5.742.384.940	-
Biaya imbalan pasti	1.587.059.055	1.675.146.691
Pengukuran kembali imbalan pasti	10.662.438.824	5.722.823.144
Pembayaran imbalan kerja oleh entitas	-	-
Pembayaran iuran tahun berjalan	(3.410.329.193)	(1.655.584.895)
Liabilitas bersih akhir tahun	14.581.553.626	5.742.384.940

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset)/imbalan pasti neto adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	15.655.659.096	9.932.835.952
- Keuntungan aktuarial	8.251.720.504	(71.097.996)
- Imbal hasil atas aset program	2.410.718.320	15.457.857.295
- Perubahan atas dampak aset di luar bunga neto	-	(9.663.936.155)
Jumlah pengukuran kembali tahun berjalan	10.662.438.824	5.722.823.144
Liabilitas bersih akhir tahun	26.318.097.920	15.655.659.096

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

25. Imbalan Kerja (lanjutan)

Persentase setiap kategori utama dari aset investasi adalah sebagai berikut:

	2017
Surat berharga pemerintah	15,64%
Deposito <i>on call</i>	0,00%
Deposito berjangka	2,36%
Saham	4,08%
Obligasi	0,00%
Sukuk	0,00%
Reksadana	37,12%
Penempatan langsung	5,74%
Tanah	32,84%
Bangunan	2,21%
Tanah dan bangunan	0,00%
Lainnya	0,00%
Jumlah	100,00%

Asumsi Aktuarial

Perhitungan Aktuarial untuk biaya imbalan pasti, menganut prinsip nilai sekarang dari jumlah pembayaran atas imbalan karena pensiun, imbalan karena meninggal dunia dan imbalan karena cacat. Perhitungan nilai sekarang diperoleh dari penggunaan berbagai asumsi aktuarial. Tidak hanya berdasarkan tingkat bunga tetapi juga berdasarkan atas kenaikan PhDP, tingkat kematian, cacat dan pengunduran diri. Perhitungan atas semua faktor dimaksud lazim disebut nilai tunai aktuarial.

Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan adalah metode *Projected Unit Credit*, sesuai yang dipersyaratkan oleh PSAK 24 (Revisi 2013). Metode *Projected Unit Credit* digunakan sesuai ketentuan yang disyaratkan pada paragraf 67 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 (Revisi 2013) tentang imbalan kerja. Perhitungan Aktuarial dengan metode ini adalah dengan mengalokasikan setiap unit imbalan kerja kedalam masa kerja yang mungkin dijalani sampai dengan pensiun.

Asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan untuk perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	Asumsi
Tingkat diskonto	6,78%
Tingkat kenaikan PhDP	4,00%
Tabel mortalitas	AMT-1949 Mod
Tingkat cacat	1% dari tingkat kematian
Tingkat pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier s.d. 0 pada usia pensiun normal

Jumlah, waktu dan arus kas masa depan

- a. Analisis sensitivitas berdasarkan perubahan tingkat diskonto

	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	Perubahan
0,50%	178.337.473.291	-0,65%
-0,50%	180.714.865.641	0,68%

- b. Analisis Iuran Jatuh Tempo

Tahun Ke	Iuran Jatuh Tempo
< 1	1.315.070.763
1 - < 2	1.287.796.017
2 - < 3	1.268.090.336
3 - < 4	1.244.743.017
4 - < 5	1.233.680.338
≥ 5	7.324.805.276

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

25. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Pasti Pasca Kerja Lainnya

Selain program pensiun di atas, Perusahaan memiliki Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, manfaat PPUKP dapat dikompensasikan terhadap semua kewajiban Perusahaan kepada karyawannya dalam memenuhi ketentuan Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003 pada saat karyawan memasuki usia pensiun maupun karyawan yang terkait dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sepanjang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan.

Beban imbalan kerja lainnya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 menggunakan angka yang dihitung oleh Aktuaris PT Bestama Aktuarial melalui laporannya dengan Nomor: 17003/PEL-1/EP/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Nomor: 16017/PEL-1/EP/01/2017 tanggal 5 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal tahun	208.813.049.620	294.265.333.505
Biaya bunga	17.631.020.714	25.562.408.900
Biaya jasa kini	14.245.309.921	13.006.037.119
Kurtailmen	-	(120.132.935.525)
Biaya jasa lalu	-	28.870.103.176
Pembayaran imbalan kerja	(21.847.671.634)	(33.483.173.023)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial - asumsi	(3.305.697.991)	579.757.064
(Keuntungan)/kerugian aktuarial - kewajiban	4.618.964.432	145.518.404
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir tahun	220.154.975.062	208.813.049.620

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Aset program awal periode	60.905.483.535	88.414.003.654
Hasil pengembangan riil	(24.041.130)	3.432.741.214
Pembayaran imbalan kerja	(21.032.957.134)	(30.941.261.333)
Aset program akhir periode - aktual	39.848.485.271	60.905.483.535

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan:

	2017	2016
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	220.154.975.062	208.813.049.620
Nilai wajar aset program	(39.848.485.271)	(60.905.483.535)
Defisit/(surplus)	180.306.489.791	147.907.566.085
Batas atas aset	-	-
Liabilitas/(Aset)	360.612.979.582	295.815.132.170

Beban yang diakui di laba rugi:

	2017	2016
Biaya jasa kini	14.245.309.921	13.006.037.119
Beban bunga neto	13.297.566.287	18.997.505.331
Kurtailmen	-	(120.132.935.525)
Biaya jasa lalu	-	28.870.103.176
Jumlah	27.542.876.208	(59.259.289.899)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto:

	2017	2016
Jumlah pengukuran kembali awal tahun	83.749.621.269	79.892.183.447
- Kerugian/(keuntungan) aktuarial	1.313.266.441	725.275.468
- Imbal hasil atas aset program	4.357.495.557	3.132.162.355
- Perubahan atas dampak aset di luar bunga neto	-	-
Liabilitas bersih akhir tahun	89.420.383.267	83.749.621.270

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

25. Imbalan Kerja (lanjutan)

Perubahan liabilitas bersih adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Liabilitas bersih awal tahun	147.907.566.085	205.851.329.852
Biaya imbalan pasti	33.213.638.206	(55.401.852.077)
Pembayaran imbalan kerja oleh entitas	(814.714.500)	(2.541.911.690)
Pembayaran iuran tahun berjalan		
Liabilitas bersih akhir tahun	180.306.489.791	147.907.566.085

Asumsi Aktuarial

Perhitungan Aktuarial untuk biaya imbalan pasti, menganut prinsip nilai sekarang dari jumlah pembayaran atas imbalan karena pensiun, imbalan karena meninggal dunia dan imbalan karena cacat. Perhitungan nilai sekarang diperoleh dari penggunaan berbagai asumsi aktuarial. Tidak hanya berdasarkan tingkat bunga tetapi juga berdasarkan atas kenaikan upah, tingkat kematian, cacat dan pengunduran diri. Perhitungan atas semua faktor dimaksud lazim disebut nilai tunai aktuarial.

Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan adalah metode Projected Unit Credit, sesuai yang dipersyaratkan oleh PSAK 24 (Revisi 2013). Metode Projected Unit Credit digunakan sesuai ketentuan yang disyaratkan pada paragraf 67 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 (Revisi 2013) tentang imbalan kerja. Perhitungan Aktuarial dengan metode ini adalah dengan mengalokasikan setiap unit imbalan kerja kedalam masa kerja yang mungkin dijalani sampai dengan pensiun.

Asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan untuk perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	Asumsi
Tingkat diskonto	7,80%
Tingkat kenaikan upah	5,60%
Tabel mortalitas	Tabel mortalitas indonesia tahun 2011
Tingkat cacat	1,00% dari kemungkinan orang meninggal pada masing-masing usia
Tingkat pengunduran diri	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0 pada usia pensiun normal

Jumlah, waktu dan arus kas masa depan

- a. Analisis sensitivitas berdasarkan perubahan tingkat diskonto

	Nilai kini Kewajiban Imbalan Pasti	Perubahan
0,50%	211.572.915.031	-3,90%
-0,50%	229.366.421.046	4,18%

- b. Analisis iuran jatuh tempo

	Manfaat Jatuh Tempo	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti
Tahun ke		
< 1	20.253.628.555	22.008.012.318
1 - < 2	17.078.978.315	12.846.499.468
2 - < 3	18.204.848.636	13.462.091.814
3 - < 4	18.409.386.346	12.089.113.092
4 - < 5	11.075.854.463	6.999.494.775
> = 5	1.445.812.008.481	152.749.763.595

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

26. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

Rincian pendapatan diterima dimuka jangka panjang adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Pendapatan sewa diterima dimuka	266.631.705.829	268.391.311.069
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(56.906.961.745)	(31.427.777.357)
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	209.724.744.084	236.963.533.712

Pendapatan sewa diterima dimuka merupakan pendapatan sewa tanah dan bangunan dari pihak ketiga.

27. Modal Saham

Jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	2017		
	Persentase Kepemilikan	Lembar Saham	Nilai Nominal
Pemerintah Republik Indonesia	100%	1.700.000	1.700.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 1, tanggal 15 Agustus 2008 oleh Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi, anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.248.000.000.000 yang terbagi atas 1.248.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.800.000.000.000 yang terbagi atas 1.800.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

Peningkatan modal disetor Perusahaan sesuai Akta No.1 tanggal 15 Agustus 2008 Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., dari sebesar Rp312.000.000.000 menjadi sebesar Rp455.059.000.000 dilakukan dengan cara mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 143.059 lembar saham atau sebesar Rp143.059.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-85564.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 13 November 2008.

Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp455.059.000.000 yang terbagi atas 455.059 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, terdiri atas:

- Sebesar Rp455.059.000.000 merupakan setoran modal sesuai Akta nomor 1 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Agus Sudiono Kuntjoro.
- Sebesar Rp48.167.600.000 merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai PP No. 79 tahun 2011.
- Sebesar Rp85.000 merupakan kapitalisasi Cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011.
- Sebesar Rp8.733.315.000 merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai PP No. 34 tahun 2012.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.1.0-3524 tahun 2012 tanggal 28 September 2012.

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 yang terbagi atas 1.800.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 yang terbagi atas 6.800.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, terdiri atas:

- Sebesar Rp511.960.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai Akta Nomor 88 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H.
- Sebesar Rp1.188.040.000.000 merupakan kapitalisasi Cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2013.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

28. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp525.884.662.252 dan Rp538.812.899.239, merupakan Penyertaan Modal Negara berupa aset yang berasal dari proyek-proyek Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Tambahan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya Tahun 2011		
a. Berasal dari Kementerian Perhubungan		
Dermaga dan fasilitas pelabuhan Dumai Fase 3	414.128.745.519	427.056.982.506
Tambahan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya Tahun 2013		
a. Bersumber dari Kementerian Perhubungan		
Pembangunan Dermaga sisi selatan dan fasilitas pendukung lainnya (8,3 x 43,5 m) di Sibolga	36.743.091.536	36.743.091.536
Satu unit <i>forklift</i> merk Patria kapasitas 3 ton	196.900.000	196.900.000
Satu unit <i>forklift</i> merk Patria kapasitas 3 ton	365.200.000	365.200.000
Fasilitas pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989.000	19.203.989.000
b. Bersumber dari Kementerian Perhubungan		
Satu unit Kapal Tunda TB Kreung Raya di cabang Malahayati	26.799.668.974	26.799.668.974
Tiga unit <i>forklift</i> kapasitas 3 ton	590.700.000	590.700.000
Tiga unit <i>forklift</i> kapasitas 3 ton	1.095.600.000	1.095.600.000
Pembukuan pencatatan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	(19.450.875)	(19.450.875)
c. Bersumber dari Kementerian Perhubungan		
Satu Kapal Tunda Kreung Geukeuh di cabang Malahayati	26.780.218.098	26.780.218.098
Jumlah Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	525.884.662.252	538.812.899.239

Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Dumai Fase III

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dumai Nomor KN.38/2/20/DJPL-11 tanggal 29 Maret 2011 perihal penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), maka pada tahun 2011 terdapat penambahan aset dengan nilai penyerahan sebagai berikut:

Dalam Rupiah (Rp)	:	349.273.056.206
Dalam Dolar Amerika Serikat (USD)	:	2.905.914
Dalam Yen Jepang	:	474.296.987

Nilai penyerahan dalam mata uang asing sebagaimana tersebut di atas dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan kurs buku Perusahaan pada bulan April 2011 sebesar Rp8.900/ USD 1 (¥ 100 ekuivalen dengan USD 1,23) sehingga nilai penyerahan BPYBDS menjadi Rp414.128.745.519.

Dermaga Dumai phase III sudah digunakan secara komersil sejak tahun 2012, pada tanggal 31 Desember 2013 disajikan sebagai aset dalam penyelesaian, dan per tanggal 31 Desember 2014 telah dilakukan reklasifikasi ke dalam aset tetap - bangunan dan prasarana (catatan 13).

Penambahan aset BPYBDS Terdiri dari 2 (dua) unit Kapal Tunda di Cabang Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe, Forklift 3 (tiga) ton dan 5 (lima) ton di Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli dan Malahayati, Dermaga dan Fasilitas di Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli. Sudah diusulkan kepada Kementerian Teknis pada tanggal 19 November 2013 dan diriviu oleh BPKP pada tanggal 14 Agustus 2013 dan 02 Desember 2013.

Berdasarkan Berita acara rekonsiliasi data bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: BA-10/KN.3/REKON.BPYBDS/2018 tanggal 06 Februari 2018 disepakati bahwa nilai BPYBDS pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp525.884.662.252.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

29. Pembagian Laba dan Cadangan Umum

Pembagian laba dan cadangan umum tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Penyisihan untuk cadangan umum	513.521.829.177	595.121.937.267
Pembagian dividen tunai	220.081.000.000	105.275.000.000
Jumlah	733.602.829.177	700.396.937.267

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor 1 tanggal 8 Mei 2017, penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2016 ditetapkan sebagai berikut:

- Dividen sebesar 30% atau Rp220.081.000.000
- Cadangan sebesar 70% atau Rp513.521.829.177

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor 02 tanggal 19 Mei 2016, penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2015 ditetapkan sebagai berikut:

- Dividen sebesar 15% atau Rp105.275.000.000.
- Cadangan sebesar 85% atau Rp595.121.937.267.

Laba bersih Perusahaan tahun 2015 sebesar Rp700.396.937.267, Perusahaan menetapkan besaran Dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2016 sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas milyar Rupiah) dihitung ekuivalen $\pm 2\%$ dari laba bersih tahun 2015, yang sumber dananya diambil dari beban Perusahaan serta sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun sebelumnya.

30. Kepentingan Non Pengendali

Kepentingan non pengendali atas aset bersih dan atas laba/(rugi) bersih entitas anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

	31-Des-17	31-Des-16
Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Petikemas		
Kotamadya Medan	972.202.350	829.771.274
PT Prima Multi Terminal	85.115.883.463	40.466.953.288
Koperasi Karyawan Kantor Pusat		
PT Pelabuhan Indonesia I Medan	54.721.297	160.012.977
Jumlah	86.142.807.110	41.456.737.539

31. Pendapatan

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pelayanan petikemas	1.307.243.197.818	1.092.951.899.770
Pelayanan barang non petikemas	363.403.287.150	301.953.226.142
Pendapatan pelayanan kapal	362.240.149.032	322.535.971.533
Pendapatan pelabuhan tersus/pelsus/dersus TML UKS	314.689.990.805	304.537.111.671
Pendapatan sewa lahan dan bangunan	98.576.082.784	89.659.536.188
Pendapatan pelayanan logistik/konsolidasi dan distribusi barang	73.297.100.659	52.619.095.183
Pendapatan jasa listrik/ <i>power plant</i> dan air	52.336.581.854	56.358.971.282
Pendapatan sewa aset, peralatan dan ruangan	42.923.437.320	44.240.452.276
Pendapatan jasa kesehatan	12.600.243.963	22.294.715.359
Pendapatan pelayaran/ <i>marine service</i>	2.791.311.224	-
Pendapatan galangan kapal (Dock)	2.300.341.783	9.073.859.607
Pendapatan jasa utilitas	-	33.013.000
Pendapatan usaha rupa-rupa	118.704.783.778	112.641.812.952
Jumlah	2.751.106.508.170	2.408.899.664.963

Pendapatan usaha rupa-rupa merupakan pendapatan pas pelabuhan, pendapatan *sharing* bongkar muat dan pendapatan *sharing* persewaan tanah.

Untuk pendapatan dengan pihak-pihak berelasi lihat catatan 40.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

32. Beban Pokok

Rincian beban pokok per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban imbalan kerja (SDM operasional)	269.394.562.584	212.910.068.406
Beban imbalan pasca kerja (SDM operasional)	856.812.163	-
Beban bahan pokok (kapal dan jasa kepelabuhan lain)	151.253.607.832	136.629.228.254
Beban pemeliharaan dan perbaikan (kapal dan fasar)	103.785.973.804	81.219.182.545
Beban sewa (kapal dan fasar kepelabuhanan)	320.632.700.111	269.030.643.847
Beban penyusutan properti investasi (fasar kepelabuhanan)	142.057.036	321.261.308
Beban penyusutan aset tetap (kapal dan fasar kepelabuhanan)	234.448.310.413	190.375.972.454
Beban amortisasi ATB (fasar kepelabuhanan)	25.108.047.297	7.576.043.897
Beban asuransi (kapal dan fasar kepelabuhanan)	20.542.747.222	21.353.183.105
Beban KSMU (fasar kepelabuhanan)	104.757.023.417	110.300.712.983
Beban pajak dan retribusi (fasar kepelabuhanan)	32.236.953.815	25.211.680.057
Beban Diklat dan Sertifikasi (SDM operasional)	203.751.985	30.210.000
Beban pakaian dinas/kerja (kapal dan fasar kepelabuhanan)	788.481.201	897.418.850
Beban keamanan dan keselamatan (kapal dan fasar)	17.982.637.302	13.826.152.862
Beban kesehatan (SDM operasional)	948.263.742	107.935.300
Beban perjalanan dinas	10.207.888.961	7.772.053.809
Beban konsultan/survei	198.241.691	86.808.327
Beban perencanaan pengembangan usaha	4.237.274.345	16.100.000
Beban provisi penurunan nilai piutang	7.623.749.488	5.211.112.232
Beban penagihan piutang	877.050.517	1.081.347.398
Beban penurunan nilai aset non keuangan	19.539.173.075	-
Beban denda, ganti rugi/klaim	55.240.069	122.364.948
Sumbangan dan beban sosial	615.414.600	748.770.500
Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	535.670.105	476.841.668
Beban administrasi perkantoran	4.161.541.063	6.327.343.523
Beban kendali mutu pelayanan (kapal dan fasar)	331.622.250	-
Lainnya	21.768.653.950	19.972.050.321
Jumlah	1.353.233.450.038	1.111.604.486.594

33. Beban Pemasaran

Rincian beban pemasaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban kehumasan	2.445.441.294	2.037.917.164
Beban promosi dan periklanan	21.602.713.589	11.843.795.190
Lainnya	7.769.475.446	-
Jumlah	31.817.630.329	13.881.712.354

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

34. Beban Umum dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban imbalan kerja (SDM administrasi perkantoran)	100.980.661.404	105.404.434.956
Beban imbalan pasca kerja (SDM administrasi perkantoran)	28.273.123.100	(57.584.142.208)
Beban Direksi, Dewan Komisaris dan perangkat kerjanya	19.398.237.261	19.701.637.583
Beban bahan	2.042.693.256	7.190.264.430
Beban pemeliharaan dan perbaikan (non kapal dan fasar)	2.050.235.932	5.198.997.167
Beban sewa (non kapal dan fasar kepelabuhanan)	11.948.498.740	9.400.795.982
Beban penyusutan properti investasi (non fasar kepelabuhanan)	39.691.969	-
Beban penyusutan aset tetap (non kapal dan fasar)	3.006.163.645	692.059.835
Beban amortisasi ATB (non fasar kepelabuhanan)	2.675.391.587	1.381.360.134
Beban asuransi (non kapal dan fasar kepelabuhanan)	8.754.493.907	10.029.954.894
Beban pajak dan retribusi (non fasar kepelabuhanan)	25.345.238.987	3.967.322.461
Beban Diklat dan sertifikasi (non SDM operasional)	10.091.622.774	8.510.364.220
Beban pakaian dinas/kerja (non SDM operasional)	908.212.000	2.892.006.782
Beban kesehatan (non SDM operasi/ <i>checkup</i> rutin)	8.242.941.851	20.535.439.387
Beban perjalanan dinas	14.211.713.565	12.464.826.504
Beban jasa konsultan dan audit	3.054.675.404	13.126.093.865
Beban perencanaan pengembangan usaha	2.200.844.142	24.210.115.246
Beban provisi penurunan nilai piutang	198.217.081	936.388.160
Beban penagihan piutang	42.002.610	-
Beban penurunan nilai aset non keuangan	474.904.170	2.385.781.504
Beban denda, ganti rugi/klaim (non denda pajak)	1.960.430	900.000
Sumbangan dan beban sosial	636.679.400	738.233.117
Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	12.651.873.160	12.936.660.958
Beban administrasi perkantoran	4.668.871.049	3.043.557.959
Lainnya	58.596.104.126	51.217.988.099
Jumlah	320.495.051.550	258.381.041.035

35. Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih

Rincian pendapatan (beban) non usaha adalah sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Pendapatan non usaha</u>		
Pendapatan denda/penalti	3.455.919.911	4.103.693.329
Pendapatan jasa giro (sebelum Pph. final)	3.499.185.966	2.272.787.396
Pendapatan sewa properti investasi lainnya	46.737.000	-
Pendapatan bunga deposito (sebelum Pph. final)	98.026.883.778	79.406.219.155
Pendapatan pembelian dokumen pengadaan	219.213.329	246.201.897
Pendapatan biaya materai yang ditagihkan	516.804.000	-
Laba penjualan aset tetap-tidak produktif	1.135.859.091	841.224.100
Pendapatan klaim asuransi	35.900.000.000	-
Laba (rugi) selisih kurs	937.991.669	47.268.983.844
Lainnya	46.701.189.425	42.567.591.468
Sub Jumlah Pendapatan Non Usaha	190.439.784.169	176.706.701.189
<u>Beban Non Usaha</u>		
Beban pajak final dan administrasi bank	(462.440.405)	(224.750.502)
Amortisasi obligasi	(830.481.756)	(415.240.878)
Beban materai	(1.312.259.105)	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	(19.794.007.859)	(22.149.931.864)
Beban konsesi	(39.809.290.808)	(38.399.885.988)
Laba (rugi) selisih kurs	(1.023.346.318)	(53.372.493.606)
Lainnya	(1.875.053.374)	(23.881.245.814)
Sub Jumlah beban Non Usaha	(65.106.879.625)	(138.443.548.652)
Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih	125.332.904.544	38.263.152.537

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

40. Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sifat dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

- Perusahaan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat suku bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN-BUMN lain maupun entitas anak BUMN.
- Perusahaan merupakan pemegang saham pada Entitas Asosiasi yaitu PT Terminal Petikemas Indonesia sebesar 25% dan PT Prima Tangki Indonesia sebesar 20%.
- Perusahaan membentuk beberapa proyek Ventura Bersama dengan beberapa partisipan lain dalam pemberian jasa layanan kepelabuhanan.

Ikhtisar Pihak-Pihak yang Berelasi dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pihak	Sifat Hubungan Berelasi	Transaksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepemilikan sama	Penempatan dana, pinjaman
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan sama	Penempatan dana, pinjaman
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan sama	Penempatan dana, pinjaman
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kepemilikan sama	Penempatan dana
PT Bank Tabungan Negara Syariah	Kepemilikan sama	Penempatan dana
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan sama	Utang usaha
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kepemilikan sama	Utang usaha
PT Utama Karya (Persero)	Kepemilikan sama	Utang usaha
PT Nindya Karya (Persero)	Kepemilikan sama	Utang usaha
PT Virama Karya (Persero)	Kepemilikan sama	Utang usaha
PT Pertamina (Persero)	Kepemilikan sama	Pendapatan, piutang usaha
PT Brantas Abipraya (Persero)	Kepemilikan sama	Utang usaha
PT Pelni (Persero)	Kepemilikan sama	Pendapatan, piutang usaha
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	Kepemilikan sama	Utang usaha
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Kepemilikan sama	Pendapatan, piutang usaha
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Kepemilikan sama	Pendapatan, piutang usaha
PT Perkebunan Nusantara IV	Kepemilikan sama	Pendapatan, piutang usaha
PT Pupuk Sriwidjaja	Kepemilikan sama	Pendapatan, piutang usaha
PT Pupuk Iskandar Muda	Kepemilikan sama	Pendapatan, piutang usaha
PT Jasa Prima Logistik Bulog	Kepemilikan sama	Pendapatan, piutang usaha
PT Semen Padang	Kepemilikan sama	Pendapatan, piutang usaha
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan sama	Piutang usaha
PT Sucofindo (Persero)	Kepemilikan sama	Utang usaha
PT Arun NGL	Kepemilikan sama	Pendapatan, Piutang usaha
PT Telomunikasi Seluler Tbk	Kepemilikan sama	Piutang usaha
PT Arkindo	Kepemilikan sama	Piutang usaha
PT Prima Terminal Petikemas	Investasi	Piutang usaha
PT Prima Multi Terminal	Investasi	Piutang usaha
PT Terminal Petikemas Indonesia	Investasi	Piutang usaha
PT Prima Tangki Indonesia	Investasi	Piutang usaha

Dalam kegiatan usahanya Perusahaan melakukan transaksi terutama dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

40. Pihak Berelasi (lanjutan)

a. Kas dan Setara Kas

Nama Pihak	2017		2016	
	Jumlah	%*)	Jumlah	%*)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	940.517.993.131	11	998.434.973.925	13,7
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	433.654.652.555	5,08	458.300.147.270	6,3
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	388.607.394.153	4,55	563.766.817.340	7,7
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	65.730.534.995	0,77	62.189.507.664	0,9
PT Bank Tabungan Negara Syariah	21.955.170.526	0,26	51.759.032.075	0,7
PT Bank Mandiri Syariah	5.001.030.355	0,14	-	-
Jumlah	1.855.466.775.715	51	2.134.450.478.274	29,2

*) Persentase terhadap total aset

b. Piutang Usaha

Nama Pihak	2017		2016	
	Jumlah	%*)	Jumlah	%*)
PT Pertamina Trans Kontinental	10.746.642.668	0,13	11.218.473.988	0,15
PT Prima Multi Terminal	9.637.301.250	0,11	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.614.012.978	0,07	-	-
PT Sarana Agro Nusantara	5.433.414.192	0,06	-	-
PT Perta Arun Gas	5.268.527.238	0,06	-	-
PT Kereta Api Logistik	1.563.614.000	0,02	-	-
PT Pertamina (Persero)	1.217.221.649	0,01	1.775.166.671	0,02
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1.160.894.337	0,01	617.259.681	0,01
PT Semen Padang	1.154.273.207	0,01	-	-
PT Arun NGL	221.939.700	0,00	1.906.808.930	0,03
PT Pertamina UPPDN I	-	-	3.705.638.499	0,05
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	5.091.940.003	0,06	3.904.579.802	0,05
Jumlah	47.109.781.222	0,6	23.127.927.571	0,32

*) Persentase terhadap total aset

c. Utang Usaha

Nama Pihak	2017		2016	
	Jumlah	%*)	Jumlah	%*)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	223.023.966.481	6,1	176.873.193.014	5,90
PT Hutama Karya (Persero)	111.258.602.136	3,1	91.430.336.409	3,05
PT Brantas Abipraya (Persero)	62.646.152.697	1,7	66.209.897.652	2,21
PT Nindya Karya (Persero)	26.571.870.119	0,7	30.560.811.595	1,02
Perusahaan Galangan Kapal	5.957.500.000	0,2	28.099.110.030	0,94
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	114.889.327.285	3,2	20.822.478.567	0,69
PT Prima Indoesia Logistik	-	-	19.733.476.316	0,66
PT Virama Karya (Persero)	7.316.575.500	0,2	8.730.375.500	0,29
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.648.580.616	0,0	-	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	59.280.000.000	1,6	-	-
PT Pertamina (Persero)	3.873.297.343	0,1	-	-
DPC Insa - Pekanbaru	1.144.818.097	0,0	-	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.281.306.150	0,1	7.281.447.301	0,24
PT Surveyor Indonesia (Persero)	1.660.583.520	0,0	3.447.901.956	0,11
PT Danareksa Sekuritas	-	-	2.119.000.000	0,07
PT Sucofindo (Persero)	5.015.220.731	0,1	2.039.489.481	0,07
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	-	-	1.837.367.281	0,06
Lainnya dibawah Rp1.000.000.000	3.988.294.358	0,1	1.990.438.906	0,07
Jumlah	631.556.095.033	17,4	461.175.324.008	15,4

*) Persentase terhadap total liabilitas

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

40. Pihak Berelasi (lanjutan)

d. Utang Bank

Nama Pihak	2017		2016	
	Jumlah	%*)	Jumlah	%*)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	119.571.780.774	3,3	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	114.299.959.981	3,1	27.299.959.981	0,9
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	156.583.056.564	4,3	72.583.056.564	2,4
Jumlah	390.454.797.319	10,7	99.883.016.545	3,3

*) Persentase terhadap total liabilitas

e. Pendapatan Usaha

Nama Pihak	2017		2016	
	Jumlah	%*)	Jumlah	%*)
PT Pertamina (Persero)	28.717.436.157	1,04	137.433.030.491	5,71
PT Sarana Agro Nusantara	-	-	10.210.564.670	0,42
PT Arun NGL	3.398.043.050	0,12	7.397.890.112	0,31
PT Pupuk Sriwijaya Palembang	9.878.913.150	0,36	6.358.366.513	0,26
PT Semen Padang	5.398.689.651	0,20	5.854.585.889	0,24
PT Pelayaran Nasional Indonesia	1.418.363.738	0,05	5.416.961.151	0,22
PT Bahtera Adhiguna	1.956.904.579	0,07	2.544.977.595	0,11
PT Banda Graha Reksa	4.905.278.677	0,18	1.680.042.820	0,07
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.507.402.893	0,05	1.438.886.862	0,06
PT A.S.D.P	807.963	0,00	485.937.395	0,02
PT Telekomunikasi Seluler Tbk	158.841.570	0,01	374.794.439	0,02
PT Perkebunan Nusantara IV	775.405.978	0,03	329.133.168	0,01
PT Sarana Bandar Nasional	294.188.855	0,01	232.421.347	0,01
PT Pupuk Iskandar Muda	555.133.282	0,02	231.012.333	0,01
PT Jasa Prima Logistik Bulog	18.327.000	0,00	180.930.180	0,01
PT Waskita Karya (Persero)	9.294.202	0,00	148.529.113	0,01
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	101.583.432	0,00	134.254.068	0,01
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	96.595.928	0,00	128.309.816	0,01
PT Djakarta LLYOD	258.332.160	0,01	96.631.909	0,00
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	-	84.980.895	0,00
Balai Diklat Belawan	-	-	69.391.882	0,00
PT Lafarge Cement Indonesia	3.678.413.088	0,13	-	-
PT Varuna Tirta Prakarsa	1.099.500	0,00	41.319.311	0,00
Jumlah	63.129.054.853	2,29	180.872.951.959	7,51

*) Persentase terhadap total pendapatan usaha

Seluruh transaksi kepada pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan.

41. Segmen Operasi

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis, Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis dan geografis. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi, informasi menurut segmen sebagai berikut:

Pendapatan Usaha, Beban Usaha dan Laba (Rugi) Usaha Berdasarkan Kegiatan Utama

	2017			
	Petikemas	Kepelabuhanan	Lainnya	Konsolidasian
Pendapatan Usaha	1.340.814.745.298	1.389.212.665.354	21.079.097.518	2.751.106.508.170
Beban Usaha	(495.514.060.874)	(749.196.735.232)	(438.994.444.948)	(1.683.705.241.054)
Lab a (Rugi) Usaha	845.300.684.424	640.015.930.122	(417.915.347.430)	1.067.401.267.116

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

41. Segmen Operasi (lanjutan)

	2016			
	Petikemas	Kepelabuhanan	Lainnya	Konsolidasian
Pendapatan Usaha	1.129.755.676.030	1.247.775.413.967	31.368.574.966	2.408.899.664.963
Beban Usaha	(412.110.054.310)	(734.233.738.928)	(266.709.506.945)	(1.413.053.300.183)
Laba (Rugi) Usaha	717.645.621.720	513.541.675.039	(235.340.931.979)	995.846.364.780

Aset Segmen dan Liabilitas Segmen Berdasarkan Kegiatan Utama

	2017			
	Petikemas	Kepelabuhanan	Lainnya	Konsolidasian
Aset				
Aset Segmen	810.608.170.500	1.610.537.996.940	21.660.764.607	2.442.806.932.047
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	6.064.336.383.701
Eliminasi Konsolidasian	-	-	-	-
Jumlah Aset	810.608.170.500	1.610.537.996.940	21.660.764.607	8.507.143.315.748
Liabilitas				
Liabilitas Segmen	205.873.233.379	573.649.651.243	23.831.389.485	803.354.274.107
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	2.799.565.280.358
Eliminasi Konsolidasian	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	205.873.233.379	573.649.651.243	23.831.389.485	3.602.919.554.465

	2016			
	Petikemas	Kepelabuhanan	Lainnya	Konsolidasian
Aset				
Aset Segmen	1.080.776.561.083	2.173.235.666.677	76.091.561.090	3.330.103.788.850
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	3.971.247.521.409
Eliminasi Konsolidasian	-	-	-	-
Jumlah Aset	1.080.776.561.083	2.173.235.666.677	76.091.561.090	7.301.351.310.259
Liabilitas				
Liabilitas Segmen	178.303.789.355	547.130.696.578	28.416.221.170	753.850.707.103
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	2.246.324.691.838
Eliminasi Konsolidasian	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	178.303.789.355	547.130.696.578	28.416.221.170	3.000.175.398.941

Segmen Operasi berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut:

a. Aset

	2017	2016
Sumatera Utara	7.925.773.601.225	5.481.997.686.821
Riau dan Kepulauan Riau	562.550.435.189	1.645.463.158.590
Aceh	18.819.279.334	173.890.464.848
Jumlah	8.507.143.315.748	7.301.351.310.259

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

41. Segmen Operasi (lanjutan)

b. Liabilitas

	2017	2016
Sumatera Utara	3.282.219.620.050	2.741.665.943.793
Riau dan Kepulauan Riau	308.964.690.130	251.185.035.173
Aceh	11.735.244.285	7.324.419.975
Jumlah	3.602.919.554.465	3.000.175.398.941

c. Pendapatan Usaha

	2017	2016
Sumatera Utara	1.910.470.108.731	1.674.219.078.497
Riau dan Kepulauan Riau	807.774.032.904	705.997.577.922
Aceh	32.862.366.535	28.683.008.544
Jumlah	2.751.106.508.170	2.408.899.664.963

d. Laba Usaha

	2017	2016
Sumatera Utara	719.219.372.627	699.067.217.627
Riau dan Kepulauan Riau	348.180.153.981	300.270.858.691
Aceh	1.740.508	(3.491.711.538)
Jumlah	1.067.401.267.116	995.846.364.780

42. Perikatan, Komitmen dan Kontijensi

Perikatan

- a. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No.UM.58/41/18/P.I-04, tanggal 26 November 2004 dengan PT Metito Indonesia untuk Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2021.
- b. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VII - 368/BLW-US.15 tanggal 21 Juni 2017 dengan PT Multi Jaya Samudera untuk Kerjasama Operasi Kapal Tunda *Time Charter*. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 23 Mei 2017 - 22 Mei 2018.
- c. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-321/BLW-US.15 tanggal 29 Mei 2017 dengan PT Emitraco Investama Mandiri 01 untuk Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas dan Curah Kering di Dermaga Ujung Baru. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2017 - 31 Desember 2017.
- d. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-330/BLW-US.15 tanggal 7 Juni 2017 dengan PT Emitraco Investama Mandiri 02 untuk Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas dan Curah Kering di Dermaga Ujung Baru. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Mei 2017 - 30 April 2018.
- e. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No.B.IX-602/BLW-US.15 tanggal 22 November 2017 dengan PT Emitraco Investama Mandiri 3 untuk Kerjasama Operasi Jasa Bongkar Muat di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Agustus 2017 - 31 Juli 2018.
- f. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.IX-602/BLW-US.15 tanggal 8 November 2017 dengan PT Prima Osrat Indonesia untuk Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian *Oil Boom* dan Alat Penunjang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut di Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 November 2017 - 30 Januari 2019.
- g. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-373/BLW-US.13, tanggal 18 Juli 2012 dengan PT Indoterminal Belawan Perkasa untuk *Maintenance* Instalasi Rak dan Pipa Serta Fasilitas Pendukung Terminal Minyak Kelapa Sawit di Dermaga 105 - 106 Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2023.
- h. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-521/BLW-US.15, tanggal 30 Agustus 2017 dengan PT Lemo Tatagraha Mas untuk Kerjasama Sewa Menyewa Alat Bongkar Muat 2 (dua) Unit *Harbour Mobile Crane* di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 30 Agustus 2017 - 29 Agustus 2022.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

42. Perikatan, Komitmen dan Kontijensi (lanjutan)

- i. Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/9/23/PI-17.TU, tanggal 26 Juni 2017 dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Kerjasama Penjualan Pas Terminal Penumpang di Lingkungan PT Pelindo I (Persero). Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Juni 2017 - 31 Mei 2018.
- j. Pelabuhan Belawan Internasional Container Terminal menandatangani perjanjian kerjasama No.UM.57/14/11/BICT-17.TU, tanggal 09 Oktober 2017 dengan PT Lemo Tatagraha Mas untuk Kerjasama Persewaan *Reach Stacker* untuk Kegiatan *Lift On / Lift Off* Di BICT. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 9 Oktober 2017 - 08 Oktober 2018.
- k. Terminal Peti Kemas Domestik Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/4/10/TPKDB-16.TU, tanggal 10 Mei 2016 dengan PT Emitraco Investama Mandiri untuk Kerjasama Dengan Cara Sewa 1 (satu) Unit *Mobile Harbour Crane* (HMC) di Terminal Petikemas Domestik Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 10 Mei 2016 - 09 Mei 2019.
- l. Terminal Peti Kemas Domestik Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/2/16/TPKDB-16, tanggal 28 Maret 2016 dengan PT Tirta Nusa Persada untuk Kerjasama Operasional 2 Unit *Reach Stacker* di terminal Peti Kemas Domestik Belawan Dengan Cara Sewa. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 28 Maret 2016 - 27 Maret 2018.
- m. Pelabuhan Gunung Sitoli menandatangani perjanjian kerjasama No. HK.46/1/10/GST-17.TU, tanggal 01 Februari 2017 dengan PT ISS *Parking Management* untuk Kerjasama Jasa Pengelolaan Pas Pelabuhan Melalui Pengoperasian *Autogate System* untuk Fasilitas Pelabuhan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Februari 2017 - 31 Januari 2019.
- n. Pelabuhan Kuala Tanjung menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-13/KTG-US.13 tanggal 17 Januari 2013 dengan PT Inalum untuk kerjasama jasa kepelabuhanan kapal. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018.
- o. Pelabuhan Kuala Tanjung menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-12/KTG-US.13 tanggal 17 Januari 2013 dengan PT Multimas Nabati Asahan untuk kerjasama pembagian *sharing* air dan PBM Dermaga untuk keperluan sendiri. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018.
- p. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. B-XV.28.A/DUM-US.15 tanggal 05 Mei 2017 dengan Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian peralatan *Reach Stacker* (RS) dan *Head Truck* (HT) bersama Chasisnya di Pelabuhan Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 8 Februari 2017 - 07 Februari 2018.
- q. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/48/10/DUM-17.TU tanggal 05 Mei 2017 dengan Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian kapal tunda *time charter* TB. Martha Indah di Pelabuhan Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Februari 2017 - 31 Januari 2018.
- r. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/5/21/DUM-17 tanggal 1 Februari 2017 dengan PT Multi Jaya Samudera untuk Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian kapal tunda *time charter* TB. Meiden Cantik di Pelabuhan Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Mei 2017 - 30 April 2018.
- s. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.57/2/1/DUM-17 tanggal 03 Juli 2017 dengan PT Multi Jaya Samudera untuk Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian kapal tunda *time charter* TB. Speed Turbo di Pelabuhan Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Juli 2017 - 30 Juni 2018.
- t. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.58/41/18/P.I-04 dan No 001/AGR/PI-MI/04 tanggal 26 November 2004 dengan PT Metito Indonesia untuk kerjasama operasi pelayanan air. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 April 2005 sampai dengan 31 Maret 2019.
- u. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No.US.12/1/21/DUM-16 tanggal 01 November 2016 dengan PT Ivo Mas Tunggal untuk Operasi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Khusus (Tersus) di Lubuk Gaung Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 November 2016 – 31 Oktober 2018.
- v. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No.B-XV.28/Dum-US.15 tanggal 20 Februari 2016 dengan PT Sari Dumai Sejati untuk Operasi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Khusus (Tersus) di Lubuk Gaung Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 20 Februari 2017 - 19 Februari 2022.
- w. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No.B-XV.101/Dum-US.15 tanggal 15 September 2015 dengan PT Intibenua Perkasatama untuk kerjasama Operasi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Khusus (Tersus) di Lubuk Gaung Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 September 2015 – 31 Agustus 2020.
- x. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-05/Dum-US.12 tanggal 15 Januari 2013 dengan PT Kawasan Industri Dumai untuk kerjasama Pemanduan dan Penundaan di Terminal Khusus (Tersus) PT Kawasan Industri Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 14 Januari 2018

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

42. Perikatan, Komitmen dan Kontijensi (lanjutan)

- y. Pelabuhan Sei Pakning menandatangani perjanjian kerjasama No. US.12/1/1/SPN-15 tanggal 20 Januari 2015 dengan PT Berkah Intan Perkasa untuk Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan Sei Pakning. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- z. Pelabuhan Sei Pakning menandatangani perjanjian kerjasama No.US.12/1/4/SPN-17 tanggal 07 Juli 2017 dengan PT Pelayaran Cahaya Papua untuk Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan di Pelsus Futong. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 7 Juli 2017 - 06 Juli 2018.
- aa. Pelabuhan Sei Pakning menandatangani perjanjian kerjasama No.US.13/1/1/SPN-17 tanggal 10 Maret 2017 dengan PT Pelayaran Sri Indrapura untuk Kerjasama *Marine Service* di Pelabuhan Sei Pakning. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2017 - 28 Februari 2018.
- ab. Pelabuhan Sei Pakning menandatangani perjanjian kerjasama No.US.13/1/2/SPN-17 tanggal 10 Maret 2017 dengan PT Armada Maritim Nusantara/Teguh Permata Nusantara untuk Kerjasama *Marine Service* di Pelabuhan Sei Pakning. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2017 - 28 Februari 2018.
- ac. Pelabuhan Sei Pakning menandatangani perjanjian kerjasama No. US.13/1/3/SPN-17 tanggal 10 Maret 2017 dengan PT Tenaga Baru Nuansa Persada untuk Kerjasama *Marine Service* di Pelabuhan Sei Pakning. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2017 - 28 Februari 2018.
- ad. Pelabuhan Batam menandatangani perjanjian kerjasama No. US. 12/1/3/BTM-16 TU tanggal 10 November 2016 dengan PT Maxsteer Dyrnusa Perdana untuk Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian *Ship to Ship Transit Anchorage* di Perairan Nipah. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 11 November 2016 s/d 10 November 2018.
- ae. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No. US.15/1/14/TBK-17 tanggal 19 Juni 2016 dengan PT Karya Karimun Mandiri untuk Kerjasama pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri di Pelabuhan TBK. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017.
- af. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No. US.15/1/15/TBK-17 tanggal 19 Juni 2016 dengan PT Karya Karimun Mandiri untuk Kerjasama pas Masuk Terminal Penumpang Luar Negeri di Pelabuhan TBK. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- ag. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.58/13/21/PI-15.TU tanggal 08 Januari 2015 dengan PT Oiltanking Karimun untuk Kerjasama Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di TUKS *Oiltanking* Kerjasama ini berlaku dari tanggal 08 Januari 2015 - 08 Januari 2018.
- ah. Pelabuhan Tanjung Pinang menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-24/TPI-US.15 tanggal 1 April 2015 dengan PT Securindo Packtama Indonesia untuk Kerjasama Pemungutan Pas Kendaraan dan Pengelolaan Jasa Perpindahan di Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017.

Kontijensi

Perkara Perdata

- a. T. Aswandin menggugat Kantor Pertanahan Kota Medan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan registrasi perkara No.43/TUN/2009/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2009 atas perbuatan Kantor Pertanahan Kota Medan yang menolak permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas ±66.800 m2 yang terletak di Jalan Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, tanah seluas ±7.100 m2 yang terletak di Jalan Pelabuhan Kelurahan Belawan II, dan tanah seluas 10 Ha yang terletak di Jalan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas nama T. Aswandin, karena tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya atas nama T. Aswandin tersebut merupakan bagian sertifikat HPL No. 1 Belawan I tanggal 03 Maret 1993 atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Atas gugatan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), masuk sebagai Tergugat Intervensi dan saat ini perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung sesuai surat pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali No. 43/G/2009/PTUN-Mdn jo. No. 37/PK/TUN/2013 tanggal 18 Juni 2014 yang putusannya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PT Pelindo I). Atas putusan tersebut, PT Pelindo I (Persero) telah membuat surat penolakan eksekusi ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai surat No. HK.45/1/12/PI-14 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penolakan Eksekusi Perkara Tata Usaha Negara Medan No. 43/G/2009/PTUN-Mdn.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

42. Perikatan, Komitmen dan Kontijensi (lanjutan)

Kontijensi

Perkara Perdata

- b. Nurhayati Asmar, dan kawan-kawan mengajukan gugatan terhadap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan registrasi perkara No. 07/Pdt.G/2000/PN-Dum tanggal 17 Pebruari 2000 karena PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menguasai bidang-bidang tanah milik Nurhayati Asmar dan kawan-kawan seluas 1.839 m² dan bangunan seluas 1.832,34 m² yang terletak di RT.03 RW.04 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur dengan gugatan ganti rugi tambahan sebesar Rp841.151.683. Saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap ahli waris alm. Ali Umar dengan registrasi perkara No. 232/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 4 Mei 2011, dengan inti gugatan menyatakan bahwa sah dan berharga surat jual beli tanah yang dibuat di antara PT Pelindo I (Persero) dengan Alm. Muhammad Ali Umar atas sebidang tanah seluas 20.028 m² yang terletak di km 20 Medan Belawan Labuhan Deli Lingkungan X B, Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Belawan dan pembayaran Jual beli atas tanah tersebut telah lunas. Saat ini telah relaas pemberitahuan putusan Kasasi No. 1430 K/Pdt/2014 yang menyatakan menolak permohonan kasasi PT Pelindo I (Persero) dan putusan dimaksud telah *in kracht* (berkekuatan hukum tetap).
- d. Gunawan Lusman selaku Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena yang bersangkutan tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanahnya, dengan register perkara No. 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat dan PT Pelindo I (Persero) masuk dalam perkara ini selaku Tergugat Intervensi karena objek gugatan yakni tanah seluas ± 6,3 Ha yang terletak di Pelabuhan Belawan dan merupakan bagian dari Sertifikat HPL No.1/Belawan I. Dasar gugatannya adalah 7 (tujuh) Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah (SPMHAT) yang dibuat oleh M. Hafizham selaku Penjual dengan Gunawan Lusman selaku Pembeli dihadapan Camat Medan Belawan. Inti gugatannya adalah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melakukan pembatalan Sertifikat HPL No. 1/1993 di Pelabuhan Belawan khusus tanah seluas sekitar 63.000 m². Putusan PTUN Medan No. 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn tanggal 06 Desember 2007 adalah batal dan mencabut sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 Belawan I tertanggal 03 Maret 1993 a.n PT Pelindo I (Persero) khusus terhadap tanah Penggugat seluas sekitar 6,3 Ha dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk mencabut Sertifikat HPL No.1 Belawan I tanggal 03 Maret 1993 a.n PT Pelindo I (Persero) khusus terhadap tanah Penggugat seluas sekitar 6,3 Ha, dimana putusan ini telah dikuatkan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali oleh MA RI, sesuai putusan Banding No. 12/BDG/2008/PTTUN-MDN tanggal 15 April 2008, Kasasi MA RI No. 248 K/TUN/2008 tanggal 3 Februari 2009 dan Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010.

Pada tanggal 23 Oktober 2015 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 1393/19-12.600/X/2015 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Untuk menolak pelaksanaan putusan dimaksud PT Pelindo I (Persero) telah mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. HK. 45/4/7/PI-15 tanggal 14 Desember 2015 perihal Penolakan Pembatalan Sertifikat HPL No.1 Belawan I Khusus terhadap tanah seluas sekitar 6,3 Ha atas Putusan PTUN Medan.

M. Hafizham, dkk membuat dan menggunakan surat yang diduga palsu berupa 7 (tujuh) buah SPMHAT yang dikeluarkan oleh Camat Medan Belawan atas tanah seluas sekitar 6,3 Ha, dimana 7 (tujuh) SPMHAT tersebut digunakan oleh M. Hafizham mengajukan gugatan Perdata atas tanah seluas 10 Ha di PN Medan dan oleh Gunawan Lusman di PTUN Medan atas tanah seluas sekitar 6,3 Ha. PT Pelindo I (Persero) telah melaporkan M. Hafizham dan Gunawan Lusman kepada Direskrimum Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dan atau menjual tanah di atas tanah yang sudah bersertifikat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 385 KUH Pidana, sesuai Laporan Pidana No. LP/796/VII/2014/SPKT "I" tanggal 7 Juli 2014 dan sesuai surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 22 Desember 2015 M. Hafizham, dkk telah ditetapkan sebagai tersangka dan penetapan M. Hafizham masuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Daftar Pencarian Orang No. DPO/258/XII/2015/Ditreskrimum dan saat ini telah ada putusan pidana PN Medan No. 418/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 18 April 2017 yang menyatakan bahwa Sdr. Pardamean Siregar bersalah pemalsuan surat dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

42. Perikatan, Komitmen dan Kontijensi (lanjutan)

Kontijensi

Perkara Perdata

PT Pelindo I (Persero) melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum JAS & Partners telah melakukan upaya hukum PK atas putusan PK PTUN No. 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010 sebagaimana putusan PK No. 2 PK/TUN/2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan amar putusan mengabulkan permohonan PK ke 2 PT Pelindo I (Persero) dan membatalkan putusan PK No. 106 PK/TUN/2009, namun Gunawan Lusman melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan upaya hukum PK atas putusan PK No. 2 PK/TUN/2017 dimaksud sebagaimana Memori PK tanggal 16 Mei 2017 dan PT Pelindo I (Persero) sudah menjawab memori PK tersebut melalui kontra memori PK tertanggal 14 Juni 2017, namun sesuai surat PTUN Medan No. W1-TUN1/57/AT.02.07/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 diberitahukan kepada Kuasa Hukum Gunawan Lusman bahwa berkas perkara peninjauan kembali tersebut dikembalikan oleh MA RI kepada PTUN Medan. Sehingga dengan demikian putusan PK No. 2 PK/TUN/2017 telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

e. CV SAA Inti Karya Teknik melalui kuasanya hukumnya, Abraham Law Firm mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan register perkara No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Mei 2016 terkait PT Pelindo I (Persero) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian atas pemotongan Plat Deck seberat 8.528,99 kg sehingga total kerugian yang harus dibayar PT Pelindo I (Persero) sebesar Rp505.107.690. Putusan pengadilan Negeri Medan tanggal 14 November 2016 menyatakan:

- Mengabulkan gugatan CV SAA Inti Karya Teknik untuk sebagian;
 - Menyatakan PT Pelindo I (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum PT Pelindo I (Persero) untuk mengembalikan DP kepada CV SAA Inti Karya Teknik sebesar
- Saat ini PT Pelindo I (Persero) sedang mengajukan Banding atas putusan PN Medan sesuai akta banding No. 170/2016 tanggal 23 November 2016 dan perkara dimaksud masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat Banding.

f. CV Sumatera Sejahtera menggugat PT Pelindo I (Persero) selaku Tergugat, Hyundai Merchant Marine Co, Ltd selaku Turut Tergugat I, PT Sarana Jasa Bahari selaku Turut Tergugat II dan PT Kemasindo Cepat Nusantara selaku Turut Tergugat III atas peristiwa hilangnya *part reefer machine* container HDMU 5576639 yang berisi produk hasil ikan milik Penggugat yang mengakibatkan rusaknya produk ikan tersebut. Perkara dimaksud telah diputus oleh Majelis Hakim PN Medan pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan amar putusan, antara lain :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- PT Pelindo I (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum PT Pelindo I (Persero) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.002.211.000,- (dua milyar dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Atas putusan Majelis Hakim PN Medan tersebut, PT Pelindo I (Persero) telah mengajukan upaya hukum Banding sesuai akta Banding No. 161/2017 tanggal 30 November 2017 dan saat ini masih dalam proses penyerahan berkas Banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

g. Gugatan Yayasan Wahana Sinergi Nusantara di Pengadilan Negeri Dumai dengan register perkara No. 19/Pdt.G/2017/PN.Dum tanggal 19 Juni 2017 terhadap Pemerintah Kota Dumai selaku Tergugat I, PT Wilmar Nabati Indonesia selaku Tergugat II, PT Inti Benua Perkasatama selaku Tergugat III, PT Nagamas Palm Oil selaku Tergugat IV, PT Sarana Agro Nusantara selaku Tergugat V, PT Kuala Lumpur Kepong selaku Tergugat VI, PT Bulking selaku Tergugat VII, PT Sari Dumai Sejati selaku Tergugat VIII dan PT Pelindo I (Persero) selaku Turut Tergugat, dengan tuntutan menyatakan tidak sah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai untuk izin operasional industri ataupun izin pemanfaatan ruang atau izin lokasi kepada Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sampai bulan Desember 2017 progres perkara adalah sampai pada pemeriksaan setempat.

Manajemen berkeyakinan bahwa peristiwa hukum tidak berdampak material pada laporan keuangan Perusahaan.

43. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa mendatang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang bank dalam mata uang asing dengan suku bunga mengambang. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Suku Bunga

Manajemen Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh Manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga adalah dengan melakukan evaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Perusahaan memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan campuran yang sesuai atas tingkat suku bunga mengambang dan tingkat bunga tetap. Di samping itu, suku bunga bank di dalam perjanjian ditetapkan berdasarkan angka JIBOR plus margin untuk rupiah dan SIBOR plus margin untuk valuta asing.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa mendatang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas, dan utang bank dalam mata uang asing.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang lain-lain, dan aset lancar lainnya.

Manajemen mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, dan menerapkan *cash management system* pada operasional pelabuhan serta melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur. Perusahaan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti simpanan di bank dengan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat kebutuhan dana Perusahaan saat ini cukup signifikan akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga secara rutin melakukan evaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas utang dan ekuitas pasar modal.

Perusahaan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Pengelolaan Modal

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Perusahaan memonitor modal berdasarkan rasio pinjaman bank terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi total pinjaman bank dengan total modal. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

44. Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dengan kondisi pasar saat ini.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar dikategorikan sesuai dengan hirarki berikut:

- **Input Level 1**
 Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif aset atau liabilitas yang identik.
- **Input Level 2**
 Teknik lain atas semua input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- **Input Level 3**
 Teknik yang menggunakan input yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Aset dan Liabilitas Keuangan Lancar

Instrumen keuangan lancar Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, uang muka, aset keuangan lancar lainnya, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas keuangan lancar lainnya. Nilai tercatat instrumen keuangan lancar Perusahaan mendekati perkiraan nilai wajarnya dikarenakan jatuh tempo jangka pendek atas instrumen keuangan tersebut.

Aset dan Liabilitas Keuangan Tidak Lancar

Aset keuangan tidak lancar terdiri dari aset keuangan tidak lancar lainnya. Nilai wajarnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak lawan menggunakan suku bunga pasar terkini untuk instrumen serupa.

Liabilitas keuangan tidak lancar terdiri dari utang bank jangka panjang dan utang obligasi. Nilai wajarnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Perbandingan dengan kategori jumlah tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan setara kas	1.872.411.160.625	1.872.411.160.625
Piutang usaha	200.578.860.395	200.578.860.395
Aset keuangan lancar lainnya	97.416.051.632	97.416.051.632
Jumlah Aset Keuangan Lancar	2.170.406.072.652	2.170.406.072.652
Aset Keuangan Tidak Lancar		
Aset keuangan tidak lancar lainnya	15.764.186.140	15.764.186.140
Jumlah Aset Keuangan Tidak Lancar	15.764.186.140	15.764.186.140
Jumlah Aset Keuangan	2.186.170.258.792	2.186.170.258.792
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang usaha	1.432.472.580.129	1.432.472.580.129
Utang bank jangka pendek	10.571.780.774	10.571.780.774
Utang pajak	48.077.542.635	48.077.542.635
Biaya yang masih harus dibayar	166.380.229.903	166.380.229.903
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	1.657.502.133.441	1.657.502.133.441

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

44. Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Perbandingan dengan kategori jumlah tercatat dan nilai wajar aset dan kewajiban keuangan lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang bank jangka panjang	379.883.016.545	379.883.016.545
Utang obligasi	996.601.217.455	996.601.217.455
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	1.376.484.234.000	1.376.484.234.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	3.033.986.367.441	3.033.986.367.441
	2016	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	2.200.769.796.594	2.200.769.796.594
Piutang usaha	125.321.592.573	125.321.592.573
Aset keuangan lancar lainnya	120.497.145.657	120.497.145.657
Jumlah Aset Keuangan	2.446.588.534.824	2.446.588.534.824
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang usaha	1.075.335.306.782	1.075.335.306.782
Utang bank jangka pendek	-	-
Utang pajak	35.955.877.699	35.955.877.699
Biaya yang masih harus dibayar	209.002.860.663	209.002.860.663
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	1.320.294.045.144	1.320.294.045.144
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang bank jangka panjang	99.883.016.545	99.883.016.545
Utang obligasi	995.770.735.699	995.770.735.699
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	1.095.653.752.244	1.095.653.752.244
Jumlah Liabilitas Keuangan	2.415.947.797.388	2.415.947.797.388

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Aset dan Liabilitas Keuangan Lancar

Instrumen keuangan di atas yang jatuh tempo dalam jangka pendek, maka nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Liabilitas Keuangan Tidak Lancar dengan Suku Bunga Tetap dan Variabel

Terdiri dari utang bank, surat utang dan utang obligasi. Nilai wajarnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

45. Transaksi Non Kas

Aktivitas pendanaan dan investasi yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Reklasifikasi aset tetap	668.994.623.545	440.479.678.306

46. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Tidak ada kejadian penting signifikan setelah periode pelaporan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.